



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR *110* TAHUN 2012

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2011-2015**

BUPATI TEMANGGUNG

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan dan untuk mendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium, khususnya target 7C sektor air minum dan sanitasi, perlu menetapkan Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana ditulis di huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2015;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung. (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 23);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 16), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung. (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 24);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kebersihan Keindahan Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 32)

15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 14/PRT/M/2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN TEMANGGUNG 2011-2015.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD Kabupaten Temanggung.
6. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disingkat dengan RAD AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium, khususnya pada target 7C perihal proporsi penduduk dengan akses terhadap air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan pada 2015.
7. Sumber air minum yang layak meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung dan bisa digunakan sepanjang tahun, yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 (sepuluh) meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum layak meliputi air perpipaan, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan.

8. Sumber air minum tak layak didefinisikan sebagai sumber air di mana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 (sepuluh) meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase.
9. Fasilitas sanitasi yang layak didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia.
10. Fasilitas sanitasi yang layak mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (flush toilet) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik, termasuk jamban cemplung (pit latrine) terlindung dengan segel slab dan ventilasi; serta toilet kompos.
11. Fasilitas sanitasi yang tidak layak antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember, dan toilet gantung.
12. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.
13. Pendekatan berbasis lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah, dan lembaga swasta.
14. Indikator Tujuan Pembangunan Milenium untuk peningkatan akses air minum adalah proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak, perkotaan dan perdesaan.
15. Indikator Tujuan Pembangunan Milenium untuk peningkatan akses sanitasi adalah proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan.
16. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
17. Indikator SPM bidang air minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 (enam puluh) liter/orang/hari.
18. Indikator SPM bidang sanitasi adalah tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai dengan target SPM 60% (enam puluh persen), dan tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota dengan target SPM 5% (lima persen).
19. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
20. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
21. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau panjang, dan menentukan tujuan pembangunan.
22. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
23. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

24. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
25. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
26. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindari kesimpangsiuran dan duplikasi.
27. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
28. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.
29. Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMPL adalah Program Nasional Penanggulangan Kemiskinan khususnya dalam hal penyediaan air minum yang layak dan penyehatan lingkungan.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
31. Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PAMSIMAS adalah program nasional penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang dilaksanakan atau dilakukan secara partisipatif dengan sumber-sumber pendanaan dari kontribusi masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.

BAB II PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN Pasal 2

RAD-AMPL Daerah Tahun 2011-2015 berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat selama 2011 sampai dengan 2015 dalam rangka mendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium.

Pasal 3

RAD-AMPL Daerah Tahun 2011-2015 berfungsi sebagai:

- a. Instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan daerah jangka menengah;
- b. Rencana peningkatan kinerja pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan yang menerapkan partisipatif masyarakat dan pendekatan kelembagaan;
- c. Media internalisasi program/kegiatan dengan partisipatif masyarakat ke dalam program/kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL; dan
- d. Acuan pengalokasian anggaran APBD bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan AMPL;

Pasal 4

RAD-AMPL Daerah 2011-2015 yang disusun berdasarkan RPJMD Daerah untuk mendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium 2015 dan target SPM bidang air minum dan sanitasi 2014 menjadi dokumen yang harus digunakan tiap SKPD dalam penyusunan RKPD, Renja SKPD, dan APBD Daerah sampai dengan 2015.

BAB III PELAKSANAAN Pasal 5

Pelaksanaan RAD AMPL Daerah 2011-2015 adalah melalui RKPD, Renja SKPD, APBD Daerah, yang merupakan integrasi RAD AMPL Daerah ke dalam program/kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan RAD AMPL Daerah 2011-2015 tetap harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RAD-AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir 2015, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja SKPD berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL.

BAB IV PENDANAAN Pasal 7

- (1) Pendanaan pelaksanaan RAD AMPL Daerah 2011-2015 terbuka bagi sumber-sumber pendanaan diluar APBD dan APBN, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah dengan pihak penyandang dana.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL Daerah 2011-2015 dengan dana di luar APBD Kabupaten maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Bappeda dan SKPD teknis terkait.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pasal 8

Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL dilakukan sebagai berikut :

- a. Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan minimal 2 kali dalam setahun;
- b. Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan;
- c. Hasil pemantauan dan evaluasi RAD AMPL menjadi bahan penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik;
- d. Kepala SKPD kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD-AMPL yang menjadi tanggung jawab SKPD masing-masing;
- e. Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan hasil, kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan;

- f. Kepala SKPD melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda;
- g. Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL atas kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan daerah;
- h. Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukannya tersebut;
- i. Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Teknis Penyusun RAD AMPL;
- j. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah- langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD;
- k. Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Bappeda; dan
- l. Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Dokumen RAD AMPL Daerah 2011-2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 27 Desember 2012

BUPATI TEMANGGUNG,


HASYIM AFANDI

SEKDA	
ASISTEN I / II / III	
KABAG HUKUM	

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,


BAMBANG AROCHMAN



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (RAD AMPL) KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2011 - 2015



Disiapkan oleh:

POKJA AMPL KABUPATEN TEMANGGUNG

DAFTAR ISI

halaman

Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Bab I Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
1.2. Kondisi Umum Pembangunan Daerah Berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Milenium di Daerah
1.2.1. Status Capaian Kinerja Pelayanan Air Minum dan Sanitasi
1.2.2. Kondisi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Saat Ini
1.2.3. Hasil Telaahan Terhadap Kebijakan Daerah yang Berimplikasi pada Kebutuhan Pelayanan AMPL
1.2.4. Perkiraan Kebutuhan Investasi Pelayanan AMPL Daerah
1.3. Permasalahan dan Tantangan
1.3.1. Isu Strategis Kabupaten Temanggung dalam Pencapaian Target AMPL 2016
Bab II Arah Kebijakan dan Strategi Percepatan Pencapaian Target MDGs
2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan AMPL 2016
2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Target AMPL 2016
Bab III Program dan Kegiatan Prioritas RAD AMPL 2012-2016
3.1. Program Pengembangan SPAM
3.2. Program Pengembangan Kapasitas Sistem
3.3. Program Penurunan Kebocoran Air Minum
3.4. Program Peningkatan PHBS
3.5. Program Penyediaan Kebutuhan Sanitasi
3.6. Program Pengelolaan Lingkungan
3.7. Program Pengembangan BPSPAMS
Bab IV Pemantauan dan Evaluasi
4.1 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL
4.2 Formulir Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL
Bab V Penutup
Lampiran

DAFTAR TABEL

halaman

Tabel 1	Jumlah Penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Beserta Proyeksinya pada 2015 Menurut Kecamatan
Tabel 2	Target SPM Air Minum Per Provinsi Tahun 2015
Tabel 3	Target SPM Sanitasi Per Provinsi Tahun 2015
Tabel 4	Cakupan Penduduk Kabupaten Temanggung dengan Akses Air Minum Aman Tahun 2010
Tabel 5	Cakupan Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Kabupaten Temanggung Tahun 2010
Tabel 6	Status Kinerja AMPL Kabupaten Temanggung
Tabel 7	Jumlah Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Tahun 2010
Tabel 8	Jumlah Rumah Tangga Menurut Jenis Sarana Sanitasi Tahun 2010
Tabel 9	Tingkat Pelayanan PDAM Tahun 2010
Tabel 10	Tingkat Pelayanan Air Minum Kab. Temanggung Tahun 2010 Berdasarkan Penyelenggara Pelayanan
Tabel 11	Cakupan Pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Temanggung
Tabel 12	Tingkat Pelayanan Air Minum Kabupaten Temanggung Tahun 2010
Tabel 13	Gambaran Pelayanan Air Minum dengan Sistem Jaringan Perpipaan di Kabupaten Temanggung Tahun 2010
Tabel 14	Tingkat Konsumsi Air Minum Kabupaten Temanggung Tahun 2010
Tabel 15	Gambaran Tingkat Kebocoran Air Minum pada Pelayanan Sistem Jaringan Perpipaan di Kabupaten Temanggung Tahun 2010
Tabel 16	Tarif Pelayanan Air Minum Kabupaten Temanggung Tahun 2010
Tabel 17	Perkiraan Kebutuhan Investasi Air Minum Kabupaten Temanggung 2011 s/d 2015
Tabel 18	Perkiraan Kebutuhan Investasi Sanitasi Kabupaten Temanggung 2011 s/d 2015
Tabel 19	Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Temanggung 2011 sampai dengan 2015
Tabel 20	Tujuan dan Sasaran Pembangunan AMPL Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 – 2015
Tabel 21	Matriks Program Prioritas AMPL Kabupaten Temanggung Tahun 2011 – 2015 dalam Rangka Pencapaian Target 7C MDGs
Tabel 22	Formulir Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL 2012-2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2015 dapat diselesaikan.

Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 2011-2015 merupakan instrumen percepatan daerah dalam mencapai target Millennium Development Goals, khususnya target 7C (air minum dan sanitasi) dan instrument pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Air Minum dan Air Limbah.

Untuk itu program/ kegiatan yang telah termuat dalam dokumen RAD-AMPL Kabupaten Temanggung untuk dimasukkan ke dalam program/kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL, yang meliputi:

1. Program peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum berbasis masyarakat;
2. Program peningkatan akses penggunaan sanitasi yang layak;
3. Program pemecuan perubahan perilaku (PHBS);
4. Program pengelolaan lingkungan; dan
5. Program penguatan kelembagaan pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi di tingkat masyarakat

Dokumen RAD AMPL ini disusun untuk menyamakan persepsi dalam penyiapan data base dan analisis, perencanaan program/ kegiatan dan anggaran serta pembangunan AMPL Kabupaten Temanggung untuk jangka menengah ke depan. Diharapkan dengan keterpaduan program/ kegiatan dan anggaran ini dapat dihasilkan pembangunan AMPL dalam jangka menengah yang bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat Kabupaten Temanggung di bidang air minum dan sanitasi (persampahan, air limbah dan drainase serta hygiene).

Dokumen RAD AMPL ini juga sebagai informasi dan data base air minum dan sanitasi Kabupaten Temanggung yang secara berkala dapat dimutakhirkan serta diharapkan dapat dijadikan acuan/ pedoman dalam setiap kegiatan pembangunan AMPL di wilayah Kabupaten Temanggung.

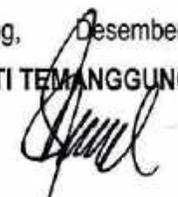
Diharapkan semoga dokumen RAD-AMPL ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan di Kabupaten Temanggung dalam rangka memenuhi tanggung jawab pelaksanaan prioritas kebijakan nasional.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas terselesaikannya Dokumen RAD AMPL Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2015.

SEKDA	
ASISTEN 1/11/111	
KABAG HUKUM	

Temanggung, Desember 2012

BUPATI TEMANGGUNG,


Drs. H. HASYIM AFANDI 

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah telah menerbitkan sejumlah kebijakan yang sangat mendukung percepatan kinerja pembangunan air minum dan sanitasi, antara lain Instruksi Presiden No 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan (mencakup program Pro Rakyat, Keadilan untuk Semua, Pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium), Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No 0445/M.PPN/11/2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Millennium Development Goals (RAD-MDGs).

Berdasarkan kebijakan tersebut, peningkatan kinerja pembangunan air minum dan sanitasi menjadi salah satu prioritas nasional sampai dengan 2015 mendatang. Dalam rangka memenuhi tanggungjawab pelaksanaan prioritas nasional tersebut, Kabupaten Temanggung menyusun Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) 2011-2015 sebagai instrumen percepatan daerah dalam mencapai target Millennium Development Goals, khususnya target 7C (air minum dan sanitasi) dan instrument pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Air Minum dan Air Limbah sesuai Permen PU No 14/PRT/M/2010.

RAD AMPL Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2015 merupakan dokumen daerah yang berfungsi sebagai:

- a. Rencana peningkatan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan program PAMSIMAS dan pendekatan kelembagaan;
- b. Instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah Tahun 2011-2015;
- c. "Channel" internalisasi program/ kegiatan dengan pendekatan program PAMSIMAS ke dalam program/ kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL;
- d. Acuan alokasi anggaran APBD bagi program peningkatan kinerja pelayanan AMPL; dan
- e. Acuan pelaksanaan replikasi program PAMSIMAS.

Penerapan RAD AMPL diharapkan memberikan hasil nyata bagi Kabupaten Temanggung yaitu dalam hal meningkatnya cakupan akses, kualitas dan kontinuitas pelayanan air minum dan sanitasi daerah sesuai target SPM dan target 7C MDGs 2015 dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan dan produktivitas masyarakat yang lebih baik.

Ruang lingkup RAD AMPL mencakup:

1. Penyediaan air minum rumah tangga;
2. Peningkatan cakupan penduduk yang menerapkan kebiasaan cuci tangan pakai sabun dan bebas buang air besar sembarangan;
3. Pengelolaan air limbah;
4. Pengelolaan limbah rumah tangga;

5. Penanganan pengelolaan kebersihan makanan

Mengingat salah satu fungsi RAD AMPL ini adalah sebagai "*channel*" internalisasi program/ kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS ke dalam program/ kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL, maka program kunci RAD AMPL adalah program yang berhubungan dengan:

1. Program peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum berbasis masyarakat;
2. Program peningkatan akses penggunaan sanitasi yang layak;
3. Program pemicuan perubahan perilaku (PHBS);
4. Program pengelolaan lingkungan; dan
5. Program penguatan kelembagaan pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi di tingkat masyarakat.

Sistematika RAD AMPL mengikuti sistematika Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs yang dikeluarkan oleh Pemerintah, dalam hal ini Bappenas melalui Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) No 0445/M.PPN/11/2010. Pada RAD-AMPL, ditambahkan komponen penulisan yang memudahkan Pemerintah Daerah untuk mengintegrasikan program/ kegiatan dalam RAD-AMPL ke dalam dokumen resmi perencanaan dan penganggaran daerah.

Sistematika RAD AMPL adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, mengemukakan kondisi umum pembangunan Kabupaten Temanggung yang memuat Latar Belakang; Kondisi Umum Pembangunan Daerah Berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Milenium di Daerah serta Permasalahan dan Tantangan dalam Pencapaian Target AMPL 2016.
- Bab II Arah Kebijakan dan Strategi Percepatan Pencapaian Target MDGs; yang mengemukakan Tujuan dan Sasaran Pembangunan AMPL serta Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Target AMPL.
- Bab III Program dan Kegiatan Prioritas RAD AMPL 2011-2015, mengemukakan program/ kegiatan seperti:
- Program Pengembangan SPAM;
 - Program Pengembangan Kapasitas Sistem;
 - Program Penurunan Kebocoran Air Minum;
 - Program Peningkatan PHBS;
 - Program Penyediaan Kebutuhan Sanitasi;
 - Program Pengelolaan Lingkungan; dan
 - Program Pengembangan BPSPAMS.
- Bab IV Pemantauan dan Evaluasi, mengemukakan mekanisme pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan program/ kegiatan dalam RAD AMPL.
- Bab V Penutup, mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan dalam rangka mendukung RAD AMPL, termasuk menggalang partisipasi dari berbagai pihak.

1.2 Kondisi Umum Pembangunan Daerah Berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Milenium di Daerah

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Secara astronomis terletak diantara $110^{\circ}23'$ BT – $110^{\circ}46'30''$ BT dan $7^{\circ}14'$ LS – $7^{\circ}32'35''$ LS. Kabupaten Temanggung terletak pada ketinggian antara 400 m sampai 3.200 m dari permukaan air laut, sebagian (50%) berupa dataran tinggi dan sebagian lagi landai. Secara administratif terletak:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Magelang; dan
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo.

Secara administrasi Kabupaten Temanggung terbagi menjadi 20 kecamatan dengan total luas wilayah 87.065 Ha dimana prosentase wilayah kecamatan terluas adalah di Kecamatan Kandangan sebanyak 9 % luas Kabupaten Temanggung atau sekitar 7.836 Ha dan wilayah kecamatan terkecil adalah Kecamatan Selopampang yaitu 1,99 % dari luas wilayah Kabupaten Temanggung atau sekitar 1.729 Ha.

Jumlah penduduk di Kabupaten Temanggung pada tahun 2010 adalah 730.455 jiwa. Jumlah tersebut telah mengalami perubahan dan pertumbuhan, karena pada tahun 2006 jumlahnya baru mencapai 703.346 jiwa. Selama lima tahun telah terjadi penambahan sejumlah 27.109 jiwa.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dapat dilihat bahwa terjadi perubahan jumlah penduduk yang ada, terjadi perubahan jumlah penduduk cukup meningkat dalam arti tingkat pertumbuhan penduduknya relatif cenderung tinggi.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Beserta Proyeksinya Pada Tahun 2016 Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2010	Proyeksi Jumlah Penduduk Tahun 2016	Rata-rata Pertumbuhan/ Tahun
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1	Parakan	49.902	54.401	0,89
2	Kledung	26.310	29.173	0,42
3	Bansari	22.696	24.897	0,73
4	Bulu	44.021	47.888	0,94
5	Temanggung	79.912	84.982	1,51
6	Tlogomulyo	21.024	22.855	0,85
7	Tembarak	28.310	30.843	0,86
8	Selopampang	18.254	19.953	0,76
9	Kranggan	43.366	47.052	1,02
10	Pringsurat	46.110	50.179	0,94
11	Kaloran	43.394	47.549	0,71
12	Kandangan	47.423	51.692	0,87
13	Kedu	52.460	57.093	0,96
14	Ngadirejo	53.920	57.623	1,32
15	Jumo	27.936	30.495	0,84
16	Gemawang	29.701	32.387	0,90
17	Candiroto	31.960	35.028	0,73
18	Bejen	20.164	22.022	0,80
19	Tretep	19.530	21.257	0,85
20	Wonobojo	24.062	23.951	0,76
	Total	730.455	791.321	0,95

Sumber : Temanggung Dalam Angka Tahun 2011

Catatan : Jumlah penduduk perkotaan berada di Kecamatan Temanggung dan Kecamatan Parakan dengan jumlah penduduk sebesar 139.384 Jiwa.

Berdasarkan rincian tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah Kabupaten Temanggung pada Tahun 2010 sebesar 730.455 jiwa, dengan penduduk terbesar terkonsentrasi di Kecamatan Temanggung yaitu sebesar 79.912 jiwa dan jumlah penduduk terkecil di Kecamatan Selopampang yaitu sebesar 18.254 jiwa.

Selanjutnya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Temanggung tersebut dapat dipengaruhi oleh kondisi tingkat kelahiran, kematian dan migrasi dari penduduknya. Pertumbuhan penduduk yang dipengaruhi oleh tingkat kelahiran dan kematian saja disebut pertumbuhan alami dan pertumbuhan penduduk yang dipengaruhi oleh tingkat kelahiran dan kematian (pertumbuhan non alami).

1.2.1. Status Capaian Kinerja Pelayanan Air Minum dan Sanitasi

Dalam mendukung Tujuan Pembangunan Milenium secara Nasional, Kabupaten Temanggung ikut berupaya menyelesaikan pencapaian 8 Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yaitu:

1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem;
2. Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua;
3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
4. Menurunkan angka kematian anak;
5. Meningkatkan kesehatan ibu hamil;
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya;
7. Memastikan kelestarian lingkungan;
8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Pada indikator 7 (tujuh) yaitu ditempuh dengan 4 (empat) target, yaitu:

- Target 7A : Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang;
- Target 7B : Mengurangi kehilangan keanekaragaman hayati dan mengurangi kehilangan yang signifikan pada tahun 2015;
- Target 7C : Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015
- Tahap 7D : Mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan penduduk miskin di pemukiman kumuh pada tahun 2020.

Target 7C Tujuan Pembangunan Millennium adalah: menurunkan **hingga separuhnya** proporsi penduduk tanpa akses terhadap air minum layak dan sanitasi layak pada 2015.

Untuk mengukur pencapaian target 7C tersebut, indikator yang digunakan adalah:

1. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak, perkotaan dan perdesaan :
 - a. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak- perkotaan;
 - b. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak-perdesaan.

2. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan :
 - a. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak-perkotaan;
 - b. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak-perdesaan.

Dalam Tujuan Pembangunan Millennium, definisi operasional akses air minum layak adalah yang menggunakan sumber air minum layak seperti sambungan air minum rumah tangga, *standpipes*, lubang bor, sumur gali yang terlindungi, mata air terlindung, tampungan air hujan. Sedangkan definisi operasional akses sanitasi layak adalah yang menggunakan sanitasi dasar seperti toilet guyur/ toilet siram-guyur atau jamban, pipa saluran pembuangan, tangki septik atau jamban lubang, jamban cemplung dengan ventilasi yang baik, jamban cemplung dengan segel slab, atau toilet/ jamban kompos.

Selanjutnya, Standar Pelayanan Minimum (SPM) air minum 2014 menyatakan bahwa indikator SPM bidang air minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari. Sedangkan SPM sanitasi 2014 menyatakan bahwa indikator SPM bidang sanitasi adalah tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai (dengan target SPM 60%) dan tersedianya sistem air limbah skala komunitas/ kawasan/ kota (dengan target SPM 5%).

Definisi akses aman terhadap air minum, berdasarkan data BPS biasanya terdiri dari:

- Air ledeng meteran;
- Sumur pompa/bor dengan jarak > 10 m dari sumber pencemar;
- Sumur terlindungi dengan jarak > 10 m dari sumber pencemar;
- Mata air terlindungi dengan jarak > 10 m dari sumber pencemar; dan
- Air Hujan.

SPM tingkat pelayanan air limbah setempat diukur dari jumlah penduduk dengan tangki septic dan terlayani IPLT terhadap jumlah penduduk yang menggunakan tangki septic. Sedangkan SPM tingkat pelayanan sistem air limbah skala komunitas/ kawasan/ kota diukur dari jumlah masyarakat yang memiliki akses terhadap sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala kawasan terhadap jumlah penduduk di Kaupaten/ Kota.

Tabel 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 14/PRT/M/2010 tentang SPM Bidang PU dan Penataan Ruang

Bidang/ Sektor	Cluster Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian
		Indikator	Nilai	
1	2	3	4	5
Air Minum	Sangat buruk	Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan	40%	2014
	Buruk		50%	
	Sedang		70%	
	Baik		80%	

Bidang/ Sektor	Cluster Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian
		Indikator	Nilai	
1	2	3	4	5
	Sangat Baik	kebutuhan pokok minimal 60l/org/hari	100%	
Sanitasi	Air Limbah Permukiman	Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai	60%	
		Tersedianya air limbah skala komunitas/kawasan/ kota	5%	

Tabel 2. Target SPM Air Minum Per Provinsi Tahun 2015

Provinsi	Target SPM Air Minum (%)	Provinsi	Target SPM Air Minum (%)
Nanggroe Aceh Darussalam	50.00	Bali	75.00
Sumatera Utara	71.00	Nusa Tenggara Barat	70.00
Sumatera Barat	70.00	Nusa Tenggara Timur	70.00
Riau	70.00	Kalimantan Barat	72.00
Jambi	71.00	Kalimantan Tengah	52.00
Sumatera Selatan	70.00	Kalimantan Selatan	70.00
Bengkulu	50.00	Kalimantan Timur	73.00
Lampung	70.00	Sulawesi Utara	70.00
Kep. Bangka Belitung	52.00	Sulawesi Tengah	70.00
Kep. Riau	50.00	Sulawesi Selatan	70.00
DKI Jakarta	50.00	Sulawesi Tenggara	74.00
Jawa Barat	70.00	Gorontalo	70.00
Jawa Tengah	75.00	Sulawesi Barat	70.00
DI Yogyakarta	80.00	Maluku	71.00
Jawa Timur	73.00	Maluku Utara	70.00
Banten	45.00	Papua Barat	70.00
		Papua	50.00

Sumber: Bappenas, 2011

Tabel 3. Target SPM Sanitasi Per Provinsi Tahun 2015

Provinsi	Target SPM Sanitasi (%)	Provinsi	Target SPM Sanitasi (%)
1	2	3	4
Nanggroe Aceh Darussalam	65.00	Bali	90.00
Sumatera Utara	65.00	Nusa Tenggara Barat	65.00

Provinsi	Target SPM Sanitasi (%)	Provinsi	Target SPM Sanitasi (%)
1	2	3	4
Sumatera Barat	65.00	Nusa Tenggara Timur	65.00
Riau	65.00	Kalimantan Barat	65.00
Jambi	65.00	Kalimantan Tengah	65.00
Sumatera Selatan	65.00	Kalimantan Selatan	65.00
Bengkulu	65.00	Kalimantan Timur	67.00
Lampung	65.00	Sulawesi Utara	79.00
Kep. Bangka Belitung	74.00	Sulawesi Tengah	65.00
Kep. Riau	65.00	Sulawesi Selatan	70.00
DKI Jakarta	90.00	Sulawesi Tenggara	65.00
Jawa Barat	65.00	Gorontalo	65.00
Jawa Tengah	68.00	Sulawesi Barat	65.00
DI Yogyakarta	90.00	Maluku	65.00
Jawa Timur	65.00	Maluku Utara	65.00
Banten	69.00	Papua Barat	65.00
		Papua	65.00

Sumber: Bappenas, 2011

Tabel 4. Cakupan Penduduk Kabupaten Temanggung dengan Akses Air Minum Aman Tahun 2010

Sistem	Perkotaan		Perdesaan		Total	
	Jumlah Penduduk Terlayani (jiwa)	(%) Thd Penduduk Perkotaan	Jumlah Penduduk Terlayani (jiwa)	(%) Thd Penduduk Perdesaan	Jumlah Penduduk Terlayani (jiwa)	(%) Thd Penduduk Kab.
1	2	3	4	5	6	7
Jaringan Perpipaan	63.602	48,99	223.427	37,20	287.029	39,29
• PDAM	57.424	44,24	48.404	8,06	105.828	14,49
• Non PDAM	269	0,21	113.106	18,83	113.675	15,56
• Berbasis Masyarakat	5.909	4,55	61.917	10,31	67.826	9,28
Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi	47.146	36,32	183.777	30,60	230.923	31,61
Jumlah	110.748	85,31	407.204	67,79	517.952	70,91

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

Tabel 5. Cakupan Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Kabupaten Temanggung Tahun 2010

No	Jenis Modul	Jumlah Modul	Jumlah Jiwa Terlayani (jiwa)	% Jiwa thd Jumlah Penduduk Perkotaan	% Jiwa thd Jumlah Penduduk Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sumur Gali (SGL)	53.060	229.856	36,32 %	30,42 %
2	Sumur Pompa Tangan (SPT)	204	1.067		0,18 %
3					
4					
dst					

Status capaian kinerja pelayanan air minum dan sanitasi Kabupaten Temanggung dengan menggunakan indikator target 7C tersebut pada tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. 70,91 % rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak, perkotaan dan perdesaan :
 - a. 85,31 % rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak- perkotaan;
 - b. 67,79 % rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak-perdesaan.
2. 63,49 % rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan:
 - a. 72,80.% rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak-perkotaan;
 - b. 61,47.% rumah tangga telah memiliki akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak-perdesaan.

Dibandingkan dengan capaian Provinsi dan Nasional pada tahun 2010, status capaian kinerja pelayanan air minum dan sanitasi Kabupaten Temanggung relatif , melampaui rata-rata provinsi dibandingkan capaian provinsi. Capaian ini juga relatif , melampaui rata-rata Nasional dibandingkan capaian Nasional. Dibandingkan dengan target SPM Provinsi dan target MDGs Indonesia, maka kinerja AMPL Kabupaten Temanggung perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan.

Status capaian kinerja AMPL Kabupaten Temanggung ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 6. Status Kinerja AMPL Kabupaten Temanggung

No	Indikator	Capaian Kabupaten/Kota (%)			Capaian Provinsi (%)			Capaian Nasional (%)			Target SPM Provinsi (%)	Target MDGs-Indonesia (%)	
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2014	2015	
(a)	(b)	(c)			(d)			(e)			(f)	(g)	
1	Cakupan penduduk (%) dengan akses air minum yang layak			70,91			58					70	68,87
	a. Perkotaan			85,31			60						75,29
	b. Perdesaan			67,79			56						65,81
2	Cakupan penduduk (%) dengan akses sanitasi yang layak			63,49			54					68	62,41
	a. Perkotaan			72,80			67						76,82
	b. Perdesaan			61,47			41						55,55

Tabel 7. Jumlah Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Tahun 2010

No	Kecamatan	PDAM	Sumur Bor	Sumur Terlindung	Mata Air Terlindung	Air Hujan
1	2	3	4	5	6	7
1	Temanggung	10.011	-	8.268	356	-
2	Tiogomulyo	-	-	532	3.723	-
3	Kranggan	2.413	-	3.617	2.215	-
4	Tembarak	1.250	-	716	2.616	-
5	Selopampang	-	-	186	3.680	-
6	Pringsurat	2.219	-	2.327	927	-
7	Kaloran	658	-	2.149	1.995	-
8	Kedu	1.599	-	7.485	935	-
9	Kandangan	-	-	10.457	1958	-
10	Parakan	4.345	-	3.679	1.123	-
11	Bansari	-	-	1.571	2.088	-
12	Kledung	-	-	178	1.306	-
13	Candirotro	-	-	1.958	2.147	-
14	Bejen	-	-	1.066	2.062	-
15	Bulu	-	-	2.519	1.886	-
16	Jumo	1.188	-	3.243	114	-
17	Gemawang	-	-	323	2.030	-
18	Tretep	-	-	443	4.376	-
19	Wonobojo	-	-	117	5.600	-
20	Ngadirejo	1.853	-	2.226	2.970	-
Total		26.457	-	53.080	44.107	-

Sumber: Dinas Kesehatan dan PDAM

Tabel 8. Jumlah Rumah Tangga Menurut Jenis Sarana Sanitasi Tahun 2010

No	Kecamatan	Jumlah KK memiliki Jamban	Jumlah Penduduk Akses Jamban	Jumlah Penduduk Akses Jamban Sehat
1	2	3	4	5
1	Temanggung	16.846	47.152	46.990
2	Tlogomulyo	3.519	15.597	14.076
3	Kranggan	41.979	170.111	136.245
4	Tembarak	3.913	27.076	16.617
5	Selopampang	3.335	16.763	12.629
6	Pringsurat	8.275	37.264	6.505
7	Kaloran	7.614	31.982	25.765
8	Kedu	7.405	36.417	35.638
9	Kandangan	8.946	37.816	32.434
11	Parakan	8.078	47.517	27.762
12	Bansari	3.806	15.224	3.806
13	Kledung	4.766	18.649	16.427
14	Candirotlo	5.240	20.960	5.240
15	Bejen	3.969	0	3.969
16	Bulu	6.161	30.653	24.644
17	Jumo	3.362	17.772	15.682
18	Gemawang	5.384	21.536	16.152
19	Tretep	2.779	13.510	6.337
20	Wonobojo	2.127	16.366	8.858
21	Ngadirejo	5.470	30.780	7.967
	Total	152.926	653.145	463.743

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

Tabel 9. Tingkat Pelayanan PDAM TIRTA AGUNG Kabupaten Temanggung Tahun 2010

No	STATUS PDAM	JUMLAH PENDUDUK 2010 (jiwa)			CAKUPAN PELAYANAN (jiwa)			KAPASITAS PERKOTAAN (liter / detik)			INDIKASI TINGKAT KEBOCORAN (%)
		PERKOTAAN	PERDESAAN	TOTAL	PERKOTAAN	PERDESAAN	TOTAL	TERPASANG	PRODUKSI	INDIKASI KAP.IDLE	
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7	8 = 6 + 7	9	10	11 = 9 - 10	12
	SEHAT	129.814	600.641	730.455	57.424	48.404	105.828	485,6	420	65,6	26

Sumber: PDAM Tirta Agung Kab. Temanggung, 2011

Perkiraan Target Kinerja AMPL Kabupaten Temanggung 2016 berdasarkan SPM dan MDGs.

Penetapan target kinerja AMPL 2016 didasarkan pada kesepakatan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Temanggung. Target kinerja AMPL 2016 ditetapkan dengan mempertimbangkan target SPM kabupaten dan hasil perhitungan/ perkiraan target 7C MDGs di Kabupaten.

Target SPM air minum 2014 dirumuskan untuk skala kabupaten/ kota (tidak dipilah antara perkotaan dan perdesaan). Khusus untuk SPM air minum, kinerja kabupaten/ kota minimal naik satu *cluster* pada 2014. Contoh: jika cakupan penduduk dengan akses air minum yang layak pada 2010 adalah 47 % (*cluster* pelayanan = sangat buruk), maka pada 2014 minimal mencapai 50 % (*cluster* pelayanan = buruk).

Target 7C MDGs (AMPL) di Kabupaten Temanggung dihitung dengan menjumlahkan proporsi penduduk dengan akses pada tahun terakhir dengan setengah dari proporsi yang akan diturunkan sampai dengan 2015. Contoh: jika proporsi penduduk dengan akses saat ini (2010) adalah 79%, maka perkiraan target MDGs 2015 adalah:

$$79 \% + \frac{1}{2} (1-79\%) \text{ atau } 89,5 \%$$

Tabel 10. Perkiraan Target Kinerja AMPL Kabupaten Temanggung Tahun 2016 berdasarkan SPM dan MDGs

No	Indikator	Capaian (%)		Target 7C MDGs Provinsi Jateng (%)		Perkiraan Target 7C MDGs Jateng (%)		Perkiraan Target 7C MDGs-Kab Temanggung (%)		Perkiraan Target 7C MDGs Kab Temanggung Berdasarkan Target 7C MDGs Provinsi (%)	
		2010	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	
(a)	(b)	(f)	(g)	(g)	(h)	(i) = f + 1/2(1-f)	(j) = i x g/h				
1	Cakupan penduduk (%) dengan akses air minum yang layak	70,91 %	75%	80,71%	85,46 %	79,41 %					
	a. Perkotaan	85,31 %			92,66 %	86,10 %					
	b. Perdesaan	67,79 %			83,90 %	77,96 %					
2	Cakupan penduduk (%) dengan akses sanitasi yang layak	63,49 %	68 %	77 %	81,74 %	72,19 %					
	a. Perkotaan	72,80 %			86,40 %	76,30 %					
	b. Perdesaan	61,47 %			80,73 %	71,29 %					

1.2.2. Kondisi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Temanggung Saat ini

Kabupaten Temanggung menggolongkan sumber air minum ke dalam dua kategori, yaitu sumber air minum layak dan tidak layak. Sumber air minum yang layak meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum layak meliputi air leding, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan.

Sumber air minum tak layak didefinisikan sebagai sumber air di mana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase. Air kemasan dianggap sebagai sumber air minum layak hanya jika rumah tangga yang bersangkutan menggunakannya untuk memasak dan menjaga kebersihan tubuh, dan di Indonesia penggunaan air kemasan tidak dikategorikan sebagai sumber air minum layak terkait aspek keberlanjutannya.

1.2.2.1 Aspek Teknis Unit Air Baku

PDAM Tirta Agung Kabupaten Temanggung memanfaatkan mata air sebagai air baku untuk melayani kebutuhan air bersih di 9 unit pelayanan termasuk Kota Temanggung. Saat ini sejumlah 14 sumber mata air dimanfaatkan oleh PDAM Tirta Agung mulai dari 5 liter/det sampai 65 liter/det dengan jumlah kapasitas produksi 329 liter/detik. Sistem pengaliran yang ada sebagian besar secara gravitasi. Adapun sistem yang menggunakan perpompaan adalah unit IKK Pringsurat yang memompakan air dari Mata Air Tuk Bening dengan kapasitas 20 L/det, sistem pemompaan ini tentunya menyebabkan biaya operasional yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sistem gravitasi.

Memperhatikan sistem penyediaan air yang dimiliki oleh PDAM Tirta Agung jelas terlihat bahwa seluruh kapasitas sumber yang dimiliki telah dimanfaatkan sehingga di semua unit pelayanan sudah tidak ada kapasitas idle bahkan dapat dikatakan bahwa kapasitas sumbernya sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan air pelanggannya. Terbatasnya kapasitas sumber yang dimiliki merupakan kendala terbesar yang dihadapi PDAM dalam mengembangkan cakupan pelayanannya.

Walaupun saat ini sudah diupayakan pembagian kapasitas sumber terhadap daerah pelayanan yang diperhitungkan kekurangan suplai air, namun karena secara umum kebutuhan air yang ada sudah melebihi kapasitas produksi sehingga secara umum PDAM Tirta Agung belum dapat melayani pengaliran air dengan baik. Kota Temanggung merupakan wilayah yang mengalami kekurangan suplai air terbesar.

Bagi SPAM berbasis masyarakat khususnya di perdesaan, sebagian terbesar menggunakan mata air sebagai sumber air baku. Sampai dengan Tahun 2011 Jumlah desa Pamsimas termasuk Replikasi 57 Desa dengan Kapasitas kurang lebih 60 Liter/detik.

Unit Produksi

Kondisi unit-unit produksi yang dimiliki PDAM Kabupaten Temanggung saat ini sebagian besar dalam keadaan relatif baik. Kondisi ini memungkinkan PDAM Kabupaten Temanggung menjalankan kegiatan produksinya dengan baik untuk memberikan pelayanan kepada para pelanggannya. Kondisi ini pula memungkinkan hambatan-hambatan teknis dalam kegiatan produksi dapat diminimalkan.

Namun demikian, terdapat pula kekurangan yang didapat dalam unit produksi ini, yaitu belum terpasangnya unit meter induk produksi yang berfungsi untuk menghitung volume air yang dihasilkan sehingga perhitungan jumlah kehilangan air belum diperoleh lebih akurat. Selanjutnya, saat ini unit produksi yang dimiliki oleh PDAM Kabupaten Temanggung kapasitas produksi yang terpasang telah dimanfaatkan seluruhnya. Kondisi ini mengharuskan PDAM melakukan penambahan unit produksi dalam upayanya meningkatkan jumlah pelanggan.

Data produksi air bersih Bulan Desember tahun 2010 PDAM Tirta Agung, Kabupaten Temanggung menunjukkan bahwa total kapasitas produksi terpakai adalah 329 Liter/Detik atau hampir menyamai besaran dari kapasitas terpasang yang dimiliki dari instalasi produksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa saat ini dengan tingkat kehilangan air yang terjadi sebesar 30% maka unit produksi telah berada pada kondisi terpakai seluruhnya (full utilized).

Untuk SPAM perdesaan, produksi dilaksanakan dengan sangat sederhana, sebagian besar belum dilengkapi unit meter induk produksi. Di beberapa Desa produksi air baku tidak mencukupi untuk kebutuhan pelanggan.

Unit Distribusi

Jumlah sambungan pelanggan PDAM Tirta Agung hingga akhir tahun 2010 adalah 26.457 sambungan yang terdiri dari pelanggan di wilayah Perkotaan Temanggung sebanyak 10.011 sambungan dan di unit pelayanan kecil lainnya sebanyak 14.446 sambungan. Kondisi air tanah di sebagian besar wilayah Kabupaten Temanggung tergolong baik, sehingga pertumbuhan pelanggan mengalami kelambatan. Dari seluruh jumlah pelanggan yang ada, jika dihitung besaran cakupan pelayanan yang dicapai oleh PDAM Tirta Agung baru mencapai 14% dari seluruh jumlah penduduk Kabupaten Temanggung yang pada akhir Tahun 2010 telah mencapai 703 ribu penduduk.

Pada periode akhir Tahun 2010 ini diketahui bahwa PDAM Tirta Agung, Kabupaten Temanggung sebagian besar adalah melayani Rumah Tangga. Jumlah pelanggan Rumah Tangga mencakup hampir 90% dari seluruh pelanggan yang ada.

SPAM perdesaan memiliki jumlah pelanggan 67.826 jiwa, yang terdiri dari 6.073 SR dan 166 KU. Yang mencakup 9,28 % dari jumlah penduduk.

Unit Pelayanan

Aspek pelayanan pelanggan yang diberikan oleh PDAM Tirta Agung, Kabupaten Temanggung saat ini belum secara penuh dapat memberikan kepuasan kepada para pelanggannya. Beberapa aspek pelayanan tersebut adalah tempat pembayaran rekening, sosialisasi kondisi pelayanan PDAM dan forum komunikasi pelanggan.

Sosialisasi kepada para pelanggan atas informasi PDAM saat ini belum berjalan secara optimal. PDAM Tirta Agung, Kabupaten Temanggung belum melaksanakan suatu pertemuan secara langsung antara PDAM dengan para pelanggannya. Kondisi ini mengakibatkan buntunya informasi PDAM dengan para pelanggannya. Namun demikian, satu model kegiatan sosialisasi PDAM yang telah dilakukan adalah melakukan paparan kepada para stakeholder lainnya, yaitu Pemda dan DPRD. Namun, kegiatan ini belum memberikan hasil yang optimum bagi kebutuhan perkembangan PDAM Tirta Agung, Kabupaten Temanggung.

Aspek pelayanan lainnya yang juga belum dilakukan oleh PDAM Tirta Agung, Kabupaten Temanggung adalah belum terbentuknya Forum Komunikasi Pelanggan. Ketiadaan forum ini telah mengakibatkan lalu lintas informasi yang terkait dengan pelayanan air minum belum berjalan dengan baik. Misalnya, kondisi pemeliharaan daerah tangkapan air di Wilayah Kabupaten Temanggung tidak dapat berjalan dengan baik sehingga penebangan daerah tangkapan air terus berlanjut.

Untuk SPAM perdesaan dikelola oleh BP SPAMS yang dibentuk di masing-masing desa.

Tabel 10. Tingkat Pelayanan Air Minum Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Berdasarkan Penyelenggara Pelayanan

No	Penyelenggara	Sistem (Perpipaan atau Non Perpipaan)	Jenis Sumber Air Baku	Kapasitas Sumber Air Baku (l/dt)	Kapasitas Sistem (l/dt)	Kapasitas Pelayanan (Jiwa)	Jumlah Pelanggan/ Pemanfaat (Jiwa)	% Jumlah Pelanggan Terhadap Kapasitas Pelayanan	% Jumlah Pelanggan Terhadap Total Penduduk
1	PDAM	Perpipaan	Mata Air	420	354,4	141.760	125.573	88,58 %	17,19 %
2	BPSPAMS ...	Perpipaan	MAG / MAP	60	58.5	43.875	67.826	154,59 %	9,28 %

Sumber: PDAM dan DMAC

Tabel 11

Gambaran Pelayanan Air Minum dengan Sistem Jaringan Perpipaan di Kabupaten Temanggung Tahun 2010

No	Penyelenggara	Kapasitas Terpasang (l/dt)	Kapasitas Produksi (l/dt)	Produksi Saat Ini (l/dt)	Jumlah Sambungan			Jumlah Sambungan Kebutuhan Non Domestik (unit)			Jam Operasi Pelayanan (Jam/hari)
					SR	KU	KU	KU	TA	HU	
1	PDAM	420	354,4	354,4							20
2	BPSPAMS ...	65,5	60	60	6.073	166					20

Sumber: PDAM dan DMAC

Tingkat Konsumsi Air Minum

Pertumbuhan jumlah air terjual sampai dengan 2010 diperkirakan bergerak positif seiring dengan bertambahnya jumlah pelanggan pada periode tersebut. Selanjutnya konsumsi air rata-rata tiap pelanggan diasumsikan akan meningkat menjadi 22 m³/pelanggan/bulan pada tahun 2010. Dengan program optimalisasi diasumsikan jumlah air diproduksi akan tetap.

Tabel 12. Tingkat Konsumsi Air Minum Kabupaten Temanggung Tahun 2010

No	Penggunaan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Tingkat Konsumsi Air Minum (liter/orang/hari)	Standard Konsumsi Air Minum (liter/orang/hari)
1	Domestik perkotaan	128.662	120	120 – 150
2	Domestik perdesaan	409.335	60	60
3	Non domestik	46.061	90	15% x kebutuhan domestik
		Rata-rata	90	

Tingkat Kebocoran Air

Dengan asumsi kehilangan air berkurang sebesar 1% hingga 2% per tahun, maka pada tahun 2011 total kehilangan air PDAM Tirta Agung, Kabupaten Temanggung menjadi 26,8%. Diharapkan penurunan kehilangan air ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan volume air terjual.

Tabel 13. Gambaran Tingkat Kebocoran Air Minum Pada Pelayanan Sistem Jaringan Perpipaan di Kabupaten Temanggung Tahun 2010

No	Penyelenggara	Kapasitas Terpasang (l/dt)	Kapasitas Produksi (l/dt)	Produksi Saat Ini (l/dt)	Jumlah Distribusi (l/dt)	Jumlah air yang Terjual (l/dt)	Tingkat Kebocoran Air (%)
1	PDAM	420	354,4	354,4	354,4	288,8	25,8
2	BPSPAMS ...	65,5	60	60	60	60	
3							

Sumber:

1.2.2.2 Aspek Non Teknis Kelembagaan

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Agung Kabupaten Temanggung merupakan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Temanggung yang didirikan pada tahun 1986 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Temanggung No. 3 tahun 1986 tertanggal 5 Maret 1986. Dalam perjalanannya organisasi PDAM mengalami perubahan melalui Perda No. 9 Tahun 2003, tanggal 31 Maret 2003 dan Perda No. 4 Tahun 2008, tanggal 11 Februari 2008.

Pendapatan Air. Dari data yang diperoleh pada 3 tahun terakhir, Rasio Operasi ini cenderung mengalami penurunan,

Tabel 14. Tarif Pelayanan Air Minum Kabupaten Temanggung Tahun 2010

No	Penyelenggara	Sistem (Perpipaan atau Non Perpipaan)	Tarif/m ³	Kemampuan Tarif Memenuhi (beri ✓ pada kolom yang sesuai)		
				Operasional	Pemeliharaan	Recovery
1	PDAM	Perpipaan	759	✓	✓	✓
2	BPSPAMS	Perpipaan	Disepakati warga desa	✓	✓	

Sumber:

1.2.3. Hasil Telaahan Terhadap Kebijakan Daerah yang Berimplikasi pada Kebutuhan

Pelayanan AMPL

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2008-2013 menetapkan bahwa visi dan misi Kabupaten Temanggung adalah:

Visi

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, maka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah didasarkan pada asas-asas umum, yaitu :

1. Asas Kepastian Hukum, yaitu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan pemerintahan.
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu mengutamakan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3. Asas Kepentingan Umum, yaitu mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Asas Keterbukaan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, bersikap jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
5. Asas Proporsionalitas, yaitu mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara pemerintahan.
6. Asas Profesionalitas, yaitu mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik profesional dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Asas Akuntabilitas, yaitu setiap penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Sejalan dengan penerapan asas-asas umum pemerintahan tersebut dan agar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah dapat terarah dan berkelanjutan maka diperlukan adanya Visi Daerah baik untuk jangka panjang maupun jangka menengah. Visi Daerah dalam RPJPD Tahun 2005-2025 adalah Temanggung makin Maju, Mandiri,

Aman, Adil, dan Sejahtera. Untuk jangka menengah periode tahun 2008-2013 Visi Daerah adalah **BERSATU UNTUK MAJU DAN SEJAHTERA**.

Visi tersebut mengandung filosofi dasar, yaitu:

1. Untuk mewujudkan Temanggung yang lebih baik maka diperlukan adanya tekad semua komponen baik Pemerintah Daerah, swasta maupun masyarakat untuk "BERSATU". Hal ini mengandung makna menyatukan semua potensi sumberdaya manusia (SDM) dalam lingkungan birokrasi (eksekutif), legislatif, dunia usaha dan masyarakat agar mampu mengelola sumberdaya alam (SDA) secara terarah, didasarkan pada program yang mantap, pelaksanaan yang tepat, serta pengawasan yang ketat sehingga "KEMAJUAN" bisa tercapai.
2. Masyarakat yang "MAJU" mengandung makna terwujudnya kondisi masyarakat yang berkembang dan berorientasi pada upaya memajukan daerah dengan dilandasi sikap disiplin, bekerja keras, dan gemar membaca/meningkatkan kapasitas dan kapabilitas diri. Kondisi ini akan mengantarkan pada terwujudnya masyarakat yang "SEJAHTERA".
3. "SEJAHTERA" mengandung arti tercukupinya kebutuhan pokok material dan spiritual bagi masyarakat, yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu meningkatnya kehidupan perekonomian masyarakat, pelaksanaan pendidikan yang berkeadilan dan derajat kesehatan yang berkualitas, serta didukung oleh kepastian hukum dan penegakan hak azasi manusia.

Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Pemerintah Daerah jangka panjang tahun 2005-2025 adalah:

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersendikan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, kapasitas daerah dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada penegakan supremasi hukum dan HAM.
2. Mewujudkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan keagamaan dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.
3. Mewujudkan perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis pada ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah, dan cluster usaha tingkat perdesaan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah.
4. Mewujudkan ketersediaan dan pemerataan prasarana dan sarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi dan non ekonomi, pengembangan kawasan serta pengurangan kesenjangan antar wilayah.
5. Mewujudkan pembangunan daerah secara berkelanjutan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara lestari berbasis pada partisipasi segenap pemangku kepentingan dan memperhatikan dimensi tata ruang.

Misi jangka panjang tersebut diimplementasikan pada setiap periodisasi 5 (lima) tahunan menjadi misi jangka menengah. Untuk periode tahun 2008-2013 misi Pemerintah Kabupaten Temanggung adalah :

1. Meningkatkan kualitas iman dan taqwa melalui pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama, kerukunan umat beragama, dan fasilitasi kehidupan beragama.
2. Meningkatkan fasilitasi pendidikan, ketrampilan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pengembangan kualitas sumberdaya manusia.
3. Meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pelayanan kesehatan secara merata.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
5. Pemberdayaan masyarakat dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumberdaya alam dan potensi unggulan daerah, serta pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah.
6. Meningkatkan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi tersebut, kebijakan pembangunan yang dinilai akan berimplikasi pada pelayanan AMPL daerah adalah sebagai berikut:

- a) Kebijakan meningkatkan fasilitas pendidikan, ketrampilan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pengembangan kualitas sumberdaya manusia, memerlukan dukungan sistem penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan yang tidak saja melayani keluarga, namun juga pemukiman sekitar yang belum dilayani sistem penyediaan air minum dan pengolahan air limbah.
- b) Kebijakan meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pelayanan kesehatan secara merata, termasuk didalamnya adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah menjadi prioritas kelompok sasaran upaya-upaya peningkatan derajat kesehatan, termasuk melalui peningkatan derajat kesehatan, termasuk melalui peningkatan cakupan akses air minum dan sanitas.
- c) Kebijakan pemberdayaan masyarakat dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumberdaya alam dan potensi unggulan daerah, serta pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah; dengan kebijakan ini maka pemenuhan akses air minum dan sanitasi untuk mendukung produktivitas sumberdaya manusia khususnya dipedesaan juga menjadi prioritas.
- d) Kebijakan meningkatkan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup; dengan kebijakan ini maka peningkatan cakupan layanan air bersih dan penyehatan lingkungan termasuk dalam kebijakan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun kedepan.

1.2.4. Perkiraan Kebutuhan Investasi Pelayanan AMPL Daerah

Perkiraan kebutuhan investasi pelayanan AMPL daerah bertujuan untuk mengetahui perkiraan investasi yang akan diperlukan dalam rangka pencapaian target 7C MDGs. Dengan adanya perkiraan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat mempersiapkan

strategi pendanaan dan pilihan program/ kegiatan yang lebih efektif dan efisien dalam mencapai kinerja yang ditargetkan.

Angka hasil perkiraan investasi merupakan ancar-ancar biaya yang diperlukan daerah sebagai pertimbangan dalam peningkatan alokasi anggaran APBD untuk AMPL dan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan yang diusulkan untuk didanai APBD Provinsi dan APBN, juga dunia usaha/perbankan, dan masyarakat.

Terdapat berbagai metoda perhitungan untuk memperkirakan kebutuhan investasi AMPL suatu daerah. Salah satu metoda perhitungan yang digunakan dan relative sederhana, yaitu dengan menggunakan biaya per satuan unit (unit cost) tambahan akses sampai dengan 2015 mendatang.

Tambahan akses sampai dengan 2016 dihitung berdasarkan target 7C MDGs kabupaten/ kota, baik pada air minum dan sanitasi. Berdasarkan tambahan akses tersebut, investasi air minum dihitung dengan menggunakan pendekatan kelembagaan, pendekatan pemberdayaan masyarakat, dan kombinasi antara pendekatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat. Penerapan pendekatan penghitungan investasi air minum didasarkan pada hasil pemetaan atas besar tambahan akses yang dapat dipenuhi dengan pendekatan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, dan kombinasi keduanya. Investasi sanitasi dihitung dengan menggunakan pendekatan berbasis masyarakat, baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Tabel perhitungan investasi yang digunakan adalah Tabel 15a (untuk air minum) dan Tabel 15b (untuk sanitasi) berikut:

Tabel 15a: Perkiraan Kebutuhan Investasi Air Minum Kabupaten Temanggung 2011 s/d 2015

No	Indikator	Saat Ini (Tahun 2010.)		2015		Tambahan Akses sd 2015		Biaya Investasi per Unit (Rp)	Kebutuhan Investasi sd 2015 (Rp)	
		Formula (C)	Data (D)	Formula (E)	Hasil (F)	Formula (G)	Hasil (H)		Formula (J)	Hasil (K)
(A)	(B)							(I)		
1	Jumlah penduduk (jiwa)		730.455		758.578					
1.a	Perkotaan (jiwa)		129.814		134.812					
1.b	Perdesaan (jiwa)		600.641		623.766					
2	Jumlah penduduk dengan akses air minum layak (jiwa)		519.952		648.257	F2-D2	128.305		K2.a+ K2.b	57,854,350,000
2.a	Perkotaan (jiwa)* Kelembagaan / PDAM		110.748 57.424	F3.aXF1. a	124.917 68.756	F2.a D2.a	14.169 11.332 (2.883 SR)	3,000,000 Per SR		8,649,000,000
			53.324		56.161		2.837	350,000/Jiwa (pendekatan berbasis masyarakat)	H2.aX I2.a	992.950,000
2.b	Perdesaan (jiwa)* Kelembagaan / PDAM		407.204 48.404	F3.bXF1. b	523.340 67.316	F2.b D2.b	116.136 18.912 (4.728 SR)		H2.bX I2.b	14,184,000,000
			358.800		456.024		97.224	350,000/Jiwa (pendekatan berbasis masyarakat)		34.028.400,000

No	Indikator	Saat Ini (Tahun 2010.)		2015		Tambahhan Akses sd 2015		Biaya Investasi per Unit (Rp)	Kebutuhan Investasi sd 2015 (Rp)	
		Formula	Data	Formula	Hasil	Formula	Hasil		Formula	Hasil
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)
3	Cakupan penduduk dengan akses air minum layak (%)	(C2):(C1)	70,91 %	(D3)+(0.5 X(1-D3)	85,46 %					
3.a	Cakupan di perkotaan (%)	(C2.a):(C1.a)	85,31 %	(D3.a)+(0.5X(1-D3.a)	92,66 %					
3.b	Cakupan di perdesaan (%)	(C2.b):(C1.b)	67,79 %	(D3B)+(0.5X(1-D3.b)	83,90 %					

Tabel 15b: Perkiraan Kebutuhan Investasi Sanitasi Kabupaten Temanggung sd 2016

No	Indikator	Saat Ini (Tahun 2010)		2016		Tambahhan Akses sd 2016		Biaya Investasi per Unit (Rp)	Kebutuhan Investasi sd 2015 (Rp)	
		Formula	Data	Formula	Hasil	Formula	Hasil		Formula	Hasil
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)
1	Jumlah penduduk (jiwa)		730.455							
1.a	Perkotaan (jiwa)		129.814		134.812					
1.b	Perdesaan (jiwa)		600.641		623.766					
2	Jumlah penduduk dengan akses sanitasi layak (jiwa)		463.743	F3XF1	620.062	F2-D2			K2.a+ K2.b	23,445,150,000

No	Indikator	Saat Ini (Tahun 2010)		2016		Tambahkan Akses sd 2016		Biaya Investasi per Unit (Rp)	Kebutuhan Investasi sd 2015 (Rp)	
		Formula	Data	Formula	Hasil	Formula	Hasil		Formula	Hasil
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)
2. a	Perkotaan (jiwa)*		94.507	F3.aXF 1.a	116.478	F2.a- D2.a	21.971	150.000/jiwa (pendekatan berbasis masyarakat)	H2.aX I2.a	3.295,650,000
2. b	Perdesaan (jiwa)*		369.236	F3.bXF 1.b	503.566	F2.b- D2.b	134.330	150.000/jiwa (pendekatan berbasis masyarakat)	H2.bX I2.b	20.149,500,000
3	Cakupan penduduk dengan akses sanitasi layak (%)	(C2):(C1)	63,49 %	(D3)+(0 .5X(1- D3)	81,74 %					
3. a	Cakupan di perkotaan (%)	(C2.a):(C 1.a)	72,80 %	(D3.a)+ (0.5X(1 -D3.a)	86,40 %					
3. b	Cakupan di perdesaan (%)	(C2.b):(C 1.b)	61,47 %	(D3B)+ (0.5X(1 -D3.b)	80,73 %					

Total perkiraan kebutuhan investasi air minum dan sanitasi = investasi untuk air minum + investasi untuk sanitasi =
Rp. 57,854,350,000 + Rp. 23,445,150,000 = Rp. 81,299,500,000.

1.3 Permasalahan dan Tantangan

a. Tantangan Nasional dalam Penyediaan Air Minum dan Sanitasi

Tantangan utama dalam meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang layak antara lain sebagai berikut:

- 1) Belum lengkap dan terbaharukannya perangkat peraturan yang mendukung penyediaan air minum dan sanitasi yang layak.
Sejumlah peraturan yang ada sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada, sebagai contoh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang belum direvisi, sehingga menyulitkan PDAM untuk melakukan korporasi. Di samping itu, peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam bekerja sama dengan masyarakat setempat dalam pelaksanaan pembangunan air minum dan sanitasi perlu lebih diperjelas.
- 2) Belum adanya kebijakan komprehensif lintas sektor dalam penyediaan air minum dan sanitasi yang layak.
Banyak institusi dan lembaga yang membidangi pembangunan air minum dan sanitasi, sehingga dibutuhkan koordinasi yang lebih intensif, terutama pada tataran pelaksanaan program.
- 3) Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air minum.
Masih banyaknya rumah tangga yang menggunakan sumber air minum non-perpipaan menurunkan kuantitas sumber daya air minum, ditambah lagi sistem sanitasi *on-site* yang ada juga belum disertai dengan investasi dalam infrastruktur penampungan, pengolahan, dan pembuangan limbah tinja sehingga meningkatkan pencemaran terhadap sumber air baku.
- 4) Belum diimbangnya pertumbuhan penduduk, terutama di perkotaan dengan pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi yang layak.
Tingkat investasi dalam penyediaan sambungan perpipaan khususnya di perkotaan tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk perkotaan. Begitu pula investasi dalam penyediaan layanan sambungan air limbah terpusat skala kota (*sewerage system*) dan skala komunal (*communal system*).
- 5) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan praktik Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
Keadaan dan perilaku tidak sehat tercermin dari masih tingginya kasus diare yang mencapai 411 per 1.000 penduduk (Survei Morbiditas Diare Kemkes, 2010). Mencuci tangan dengan sabun masih jarang dilakukan; rumah tangga masih melakukan buang air besar di tempat terbuka. Hal ini menunjukkan arti pentingnya kampanye serta komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) untuk menumbuhkan kesadaran dan mengubah perilaku masyarakat. Saat ini, upaya KIE telah dilakukan namun masih kurang memadai. Hal ini mencerminkan masih rendahnya prioritas yang diberikan oleh para pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan KIE.

- 6) Masih terbatasnya penyedia air minum yang layak baik oleh PDAM dan non-PDAM yang sehat (kredibel dan profesional), terutama di daerah perkotaan.
Kinerja PDAM yang tidak baik dapat semakin diperburuk oleh anggapan masyarakat bahwa air adalah sesuatu yang dapat diperoleh secara cuma-cuma, bukan merupakan komoditas yang langka. Hal ini membuat masyarakat enggan membayar iuran air minum, yang pada akhirnya mempersulit penyedia layanan untuk meningkatkan layanannya melalui investasi baru. Penetapan dan pengaturan tarif belum memenuhi prinsip pemulihan biaya (*full-cost recovery*). Di samping itu, dalam penyediaan air minum berbasis masyarakat, kualitas sumber daya manusia pada lembaga pengelola juga masih menjadi kendala.
- 7) Masih terbatasnya kapasitas pemerintah daerah untuk menangani sektor air minum dan sanitasi, padahal penyediaan dan pengelolaan air minum dan sanitasi yang layak telah menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Dukungan perencanaan dan penganggaran untuk penyediaan air minum dan sanitasi yang layak belum menjadi prioritas, tercermin dari rendahnya alokasi anggaran daerah dalam mendukung pembangunan baru maupun perbaikan infrastruktur air minum dan sanitasi yang telah ada. Selain itu, masih minimnya kapasitas sumber daya manusia pelaksana pembangunan air minum dan sanitasi di daerah juga menjadi kendala penyediaan air minum dan sanitasi.
- 8) Investasi sistem penyediaan air minum dan sanitasi yang layak masih kurang memadai, baik dari pemerintah maupun swasta.
Hal tersebut antara lain diakibatkan oleh pendanaan yang masih bertumpu pada anggaran Pemerintah Pusat. Rendahnya kinerja keuangan PDAM juga menyebabkan PDAM sulit mendapatkan sumber pendanaan alternatif. Sementara itu, sumber pendanaan dari pihak swasta, baik dalam bentuk Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) ataupun *Corporate Social Responsibility* (CSR) masih belum dimanfaatkan secara signifikan.

b. Permasalahan dan Tantangan Kabupaten Temanggung dalam Penyediaan Air Minum dan Sanitasi

Permasalahan dan tantangan Kabupaten Temanggung dalam meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1) Teknis

Permasalahan yang dihadapi adalah:

- a) Sebagian sumber mata air yang memenuhi syarat permukaan di Desa/Kelurahan yang mendapat Program PAMSIMAS maupun DAK;
- b) Di luar jaringan perpipaan, saat ini opsi yang tersedia adalah sumur bor (sumur dalam), sehingga ada kemungkinan kegagalan dalam pengeboran;
- c) Kebocoran air PDAM

Tantangan yang dihadapi adalah

- a) Sebagian sumur dalam PDAM kualitas airnya mengandung kadar zat besi (Fe) mendekati ambang batas yang di syaratkan;
- b) Kondisi debit sumur dalam PDAM terus menurun dari tahun ke tahun
- c) Belum tersedianya cadangan air baku yang sustainable dan dapat diandalkan;

2) Sosial

Permasalahan yang dihadapi adalah:

- a) Di perdesaan, kesadaran untuk penerapan praktek hidup bersih dan higienis masih terbatas
- b) Di perdesaan, air belum dinilai sebagai barang ekonomi, sehingga menyulitkan pengembangan pengelolaan sarana air minum dan sanitasi.

Tantangan yang dihadapi adalah

- a) Tingginya penggunaan air sumur yang perlu diimbangi dengan pemahaman tentang air yang aman dan berkelanjutan
- b) Tingginya jumlah penduduk yang memerlukan akses air minum dan sanitasi layak sampai dengan 2015

3) Kelembagaan

Permasalahan yang dihadapi adalah

- a) Terbatasnya jumlah kelembagaan pengelolaan sarana air minum dan sanitasi di tingkat masyarakat khususnya di perdesaan;
- b) Terbatasnya jumlah sumber daya manusia untuk komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) PHBS.

Tantangan yang dihadapi adalah:

- a) Belum optimalnya koordinasi antar program dan antar pelaku bidang air minum dan penyehatan lingkungan
- b) Belum tersedianya acuan pelaksanaan program bidang air minum dan penyehatan lingkungan yang disepakati sebagai kebijakan Kabupaten Temanggung sampai dengan 2016
- c) Masih terbatasnya penerapan *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan PDAM
- d) Tarif listrik PDAM masih digolongkan ke dalam golongan industri.

4) Pendanaan

Permasalahan yang dihadapi adalah:

- a) Terbatasnya alokasi APBD untuk AMPL dibandingkan target kinerja yang harus dicapai
- b) Sumber-sumber pendanaan bidang penyediaan sarana air minum dan sanitasi belum terfokus untuk mempercepat pencapaian target 7C MDGs

Tantangan yang dihadapi adalah:

- a) Belum optimalnya fasilitasi pemerintah daerah untuk melibatkan dunia usaha dan lembaga donor dalam pendanaan pembangunan air minum dan sanitasi

- b) Isu air minum dan sanitasi belum cukup diprioritaskan dalam perumusan program dan kebijakan anggaran
- c) Belum optimalnya dukungan kebijakan anggaran bagi perluasan cakupan akses air minum dan sanitasi, khususnya di perdesaan.

5) Lingkungan:

Permasalahan yang dihadapi adalah: tingginya pemanfaatan sumur bor yang dapat membahayakan lingkungan

Tantangan yang dihadapi adalah: Tingginya kebutuhan konservasi sumber daya air untuk menjamin kepastian pasokan air baku yang dapat diandalkan.

1.3.1 Isu Strategis Kabupaten Temanggung dalam Pencapaian Target AMPL 2016

Berdasarkan permasalahan dan tantangan berdasarkan kelima aspek tersebut, isu strategis penyediaan air minum dan sanitasi Kabupaten Temanggung yang akan ditangani sampai dengan 2016 adalah sebagai berikut:

- 1) Kesiapan teknis dan pengelolaan PDAM untuk memenuhi target cakupan pelayanan;
- 2) Rendahnya cakupan akses air minum di perdesaan;
- 3) Terbatasnya sumber pasokan air yang sustainable dan dapat diandalkan;
- 4) Rendahnya kesadaran untuk menerapkan PHBS;
- 5) Belum optimalnya dukungan kebijakan anggaran bagi perluasan cakupan akses air minum dan sanitasi, khususnya di perdesaan;
- 6) Belum optimalnya fasilitasi pemerintah daerah untuk melibatkan dunia usaha dan lembaga donor dalam pendanaan pembangunan air minum dan sanitasi.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dan tantangan Kabupaten Temanggung dalam penyediaan air minum dan sanitasi, maka isu strategis yang akan diprioritaskan penanganannya sampai dengan 2016 adalah sebagai berikut:

- 1) Kesiapan teknis dan pengelolaan PDAM untuk memenuhi target cakupan pelayanan;
- 2) Rendahnya cakupan akses air minum di perdesaan;
- 3) Terbatasnya sumber pasokan air yang sustainable dan dapat diandalkan;
- 4) Rendahnya kesadaran untuk menerapkan PHBS; dan
- 5) Belum optimalnya dukungan kebijakan anggaran bagi perluasan cakupan akses air minum dan sanitasi, khususnya di perdesaan.

Belum optimalnya fasilitasi pemerintah daerah untuk melibatkan dunia usaha dan lembaga donor dalam pendanaan pembangunan air minum dan sanitasi

Tabel 15. Isu Strategis Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Temanggung

	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Cakupan Penduduk dengan akses air minum layak (%)	70,91 %					85,46 %
2. Cakupan Penduduk Perkotaan dengan akses air minum layak (%)	85,31 %					92,66 %
3. Cakupan Penduduk Perdesaan dengan akses air minum layak (%)	67,79 %					83,90 %
4. Jumlah Penduduk dengan akses air minum layak (jiwa)	571.952					648.257
5. Jumlah Penduduk Perkotaan dengan akses air minum layak (jiwa)	110.748					124.917
6. Jumlah Penduduk Perdesaan dengan akses air minum layak (jiwa)	407.204					523.340
7. Tambahan penduduk dengan akses air minum layak (jiwa)						130.305
8. Tambahan penduduk perkotaan dengan akses air minum layak (jiwa)						14.169
9. Tambahan penduduk perdesaan dengan akses air minum layak (jiwa)						116.136

Tabel 16. Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Temanggung sampai dengan Tahun 2015

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
A							
1	Jumlah penduduk	Jiwa	736.079	741.703	747.327	752.951	758.578
2	Tingkat pelayanan	%	73,82	76,73	79,64	82,55	85,46
3	Penduduk terlayani	Jiwa	544.013	570.074	596.135	622.196	648.257
4	Jumlah penduduk per SR	Jiwa	4	4	4	4	4
B							
1	Jumlah SR	Unit	27.768	29.518	31.368	32.818	34.018
2	Pemakaian oer orang	L/hari	120	120	120	120	120
3	Kebutuhan air SR	L/det	0,0127	0,0125	0,0123	0,012	0,012
4	Kebutuhan Domestik	L/det	354,4	368,9	384,6	395,1	404,6
C							
	15% dari Kebutuhan Domestik	L/det	53,16	55,33	57,69	59,26	60,69

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
	Total kebutuhan non domestik	Lt/det	53,16	55,33	57,69	59,26	60,69
D	Kebutuhan air total	Lt/det	407,56	424,23	442,29	454,36	465,9
E	Kehilangan air						
	% Kehilangan air	%	≤20%	≤20%	≤20%	≤20%	≤20%
	Jumlah kehilangan air	Lt/det	81,51	84,85	88,46	90,87	93,18
F	Kebutuhan air rata-rata (D+E)	Lt/det	489,07	509,08	530,75	545,23	559,08
G	Kebutuhan hari maksimum						
	- Faktor koefisien		1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
	- Kebutuhan air	Lt/det	586,28	610,9	636,9	654,28	670,9
H	Kebutuhan jam puncak						
	- Faktor koefisien		1.75	1.75	1.75	1.75	1.75
	- Kebutuhan air	Lt/det	855,87	890,89	928,81	926,89	978,39

BAB II
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENCAPAIAN
TARGET 7C MDGS

1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan AMPL 2015

Secara sederhana pernyataan tujuan menunjukkan arah tindakan perubahan sedangkan pernyataan sasaran menunjukkan besar hasil perubahan. Peningkatan kapasitas pelayanan bidang air minum dan sanitasi sampai dengan 2016 di Kabupaten Temanggung bertujuan untuk:

1. Meningkatkan cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan;
3. Meningkatkan kinerja teknis dan pengelolaan PDAM;
4. Menjamin ketersediaan sumber pasokan air yang *sustainable* dan dapat diandalkan; dan
5. Meningkatkan cakupan penduduk yang memahami dan menerapkan PHBS.

Adapun sasaran yang ditargetkan tercapai sampai dengan akhir 2016 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya jangkauan layanan air minum yang layak dan berkelanjutan;
2. Meningkatnya layanan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan;
3. Terpenuhinya pelayanan akses air minum oleh PDAM;
4. Bertambahnya sumber pasokan air yang dapat diandalkan dan berkelanjutan; dan
5. Meningkatnya perilaku dan peran serta masyarakat terhadap PHBS.

Tabel 17. Tujuan dan Sasaran Pelayanan AMPL Jangka Menengah
Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2015

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan	Meningkatnya cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan	Cakupan penduduk yang mengakses air minum yang layak dan berkelanjutan (%)	64	68	72,4	76	80
		Melaksanakan Replikasi program Pamsimas						
		Melaksanakan pembinaan BP SPAMS.						
2.	Meningkatkan cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan	Meningkatnya cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan	Cakupan penduduk yang mengakses sanitasi yang layak dan berkelanjutan (%)	73,8	76	79,4	82,2	85
		Meningkatnya kualitas lingkungan & sanitasi dasar di tk. Keluarga & masyarakat	Cakupan keluarga dengan jamban sehat (%)	75	78	81	84	88

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Cakupan SPAL (%)	62	69	75	80	85
			Cakupan rumah sehat memenuhi syarat kesehatan (%)	68	70	72	73	75
			Cakupan Sarana Air Bersih (%)	68	72	75	78	80
			Cakupan ABJ (%)	85	87	89	92	95
		Meningkatnya kualitas lingkungan (TTU, TPM, industri/ institusi)	Cakupan TTU memenuhi syarat (%)	76	79	81	83	84
			Cakupan TPM memenuhi syarat (%)	75	78	80	83	85
			Cakupan lingkungan institusi memenuhi syarat (%)	75	76	78	79	80
3.	Meningkatkan kinerja teknis dan pengelolaan PDAM	Meningkatnya kapasitas unit produksi	Unit IPA baru	50	300	-	-	-
			Pemanfaatan idle capacity	27	31	83	100	115
		Meningkatnya jumlah sambungan rumah	Tambahan SR	627	927	5,106	6,477	7,680
4	Meningkatkan cakupan penduduk yang memahami dan menerapkan PHBS	Meningkatnya cakupan penduduk yang menerapkan PHBS, dari 71% menjadi 85%	Cakupan rumah tangga yang menerapkan PHBS (%)	74	77	80	83	85

Penetapan pentahapan pencapaian sasaran di atas digunakan sebagai acuan perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan peningkatan pelayanan air minum dan sanitasi. Program dan kegiatan AMPL 2011-2015, baik yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBD Provinsi, APBN, maupun sumber pendanaan lainnya harus berorientasi pada upaya pencapaian sasaran 2011-2015 tersebut.

1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Target AMPL 2015

Berdasarkan tujuan dan sasaran peningkatan pelayanan AMPL Kabupaten Temanggung 2011-2015, arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Memprioritaskan perluasan cakupan pelayanan PDAM pada kawasan perkotaan dan kawasan pengembangan pelayanan PDAM (kawasan potensial PDAM);
2. Menerapkan pendekatan berbasis masyarakat untuk perluasan cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan di kawasan perdesaan dan kawasan yang tidak terjangkau pelayanan PDAM;
3. Menggalang kerjasama pendanaan dengan dunia usaha bagi perluasan akses air minum dan sanitasi pada kawasan-kawasan komersil;

4. Menggalakkan program STBM bagi desa/ kawasan dengan tingkat cakupan akses sanitasi rendah/ di bawah rata-rata kabupaten;
5. Menggalakkan kampanye PHBS melalui mobilisasi tenaga promosi kesehatan, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, dan media massa;
6. Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan sumber daya air untuk menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pasokan air baku;
7. Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas pelaku pembangunan air minum dan sanitasi melalui penguatan peran SKPD;
8. Meningkatkan alokasi APBD untuk memenuhi minimal 40 % kebutuhan investasi AMPL Kabupaten Temanggung dalam rangka pencapaian target 7C MDGs. Adapun sisanya (60 %) diupayakan melalui pendanaan APBD Provinsi, APBN, CSR, dunia usaha, dan lembaga keuangan/ perbankan.
9. Melaksanakan pembinaan BP SPAMS, khususnya di pedesaan untuk menjamin keberlanjutan SPAM pedesaan.
10. Melaksanakan Replikasi Program Pamsimas.

BAB III
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
RAD AMPL 2011-2015

3.1 Program Pengembangan SPAM

Program prioritas pengembangan SPAM di Kabupaten Temanggung yang ditangani oleh PDAM Tirta Agung Temanggung, terdiri dari:

1. Program Pengembangan Unit Air Baku

Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan penambahan layanan ke masyarakat, pada tahun 2013 direncanakan untuk menambah beberapa sumber air baru, yaitu :

- Mata air Tuk Sewu 2 dengan kapasitas 25 L/det, untuk menambah pasokan air Kota Temanggung;
- Mata Air Srancah dengan kapasitas 10 L/det, untuk menambah pasokan air IKK Jumo;
- Mata Air Bebengan dengan kapasitas 25 L/det, untuk menambah pasokan air IKK Kaloran;
- Mata Air Tuka Bening 2, dengan kapasitas 10 L/det, untuk menambah pasokan air IKK Pringsurat; dan
- Peningkatan kapasitas penyadapan di Mata Air Pikatan yang memiliki kapasitas 90 L/det, dimana semula disadap 26 L/det ditingkatkan menjadi 51 L/det untuk menambah pasokan air IKK Krangan.

Di samping itu untuk penyempurnaan sistem pasokan air, beberapa sumber air pengalirannya dialihkan untuk untuk daerah pelayanan unit lain seperti Mata Air Jumprit yang semula pasokannya dibagi dua ke IKK Ngadirejo dan Parakan nantinya akan memasok Kota Parakan saja. Kemudian Mata Air Sigetuk yang semula memasok IKK Jumo nantinya dialihkan untuk memasok IKK Ngadirejo. Adapun IKK Jumo akan mendapatkan sumber baru yaitu Mata Air Srancah.

2. Program Pengembangan Unit Produksi

Untuk menambah pasokan air yang diperoleh dari upaya peningkatan kapasitas produksi dapat mencapai sasaran peningkatan volume distribusinya maka sistem yang ada harus diikuti dengan penyesuaian kapasitas perpipaan transmisi, penyesuaian kapasitas reservoir distribusi dan pengembangan perpipaan distribusi, yang secara umum adalah sebagai berikut:

- Sistem perpipaan transmisi yang ada akan ditambah dengan pipa PVC diameter 150 mm, 200 mm dan 250 mm beserta asesorisnya dengan panjang total 12.150 m'.
- Kapasitas reservoir distribusi ditingkatkan dengan menambah beberapa unit reservoir yaitu:
 - Reservoir Tegaltemu, kapasitas 800 m³;

- Reservoir Parakan, kapasitas 250 m³;
 - Reservoir Ngadirejo, kapasitas 200 m³;
 - Reservoir Jumo, kapasitas 100 m³;
 - Reservoir Kedu, kapasitas 300 m³;
 - Reservoir Kaloran, kapasitas 40 m³;
 - Reservoir Tembarak, kapasitas 100 m³;
 - Reservoir Kranggan, kapasitas 400 m³
- Sistem perpipaan distribusi yang ada dikembangkan dengan menambah jaringan perpipaan PVC diameter 50 mm hingga 150 mm beserta asesorisnya dengan panjang total 165.102 m. Di samping itu untuk mengurangi tingkat kehilangan air di perpipaan distribusi utama dilakukan penggantian pipa asbes (ACP) diameter 150 mm, 200 mm dan 250 mm dengan pipa PVC dengan diameter yang sama.

3. Program Pengembangan Unit Distribusi

Pada tahun 2013 direncanakan PDAM akan menambah sambungan barunya sebanyak 8.000 unit atau dengan jumlah sambungan menjadi 33.102 unit. Penambahan sambungan tersebut dilakukan secara bertahap dengan penambahan sambungan baru antara 1.400 hingga 1.700 unit.

Adapun demi menyelamatkan kehilangan air akibat kesalahan pembacaan meter dilakukan penggantian terhadap meter-meter tua dan rusak sejumlah 19.000 unit. Penggantian meter tua dan rusak ini dilakukan pula secara bertahap dengan jumlah penggantian meter antara 2.000 hingga 5.000 unit.

4. Program Pengembangan Unit Pelayanan

Bidang Hubungan Langgan merupakan salah satu bidang atau bagian dari organisasi perusahaan yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan perusahaan. Saat ini, PDAM Tirta Agung, Kabupaten Temanggung telah melakukan berbagai upaya untuk secara terus menerus meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan baik pada aspek teknis dan juga non-teknis.

Disamping itu untuk menunjang program perluasan cakupan pelayanan yang direncanakan bertambah rata-rata 1.600 pelanggan per tahun. Program pemasaran yang sangat efektif sangat dibutuhkan dalam menunjang program perluasan pelayanan tersebut. Selanjutnya, untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan, beberapa program pengembangan, seperti terlihat pada bagian berikut, dapat dilaksanakan dalam lima tahun berikutnya.

- Penyeragaman penulisan nama dan alamat pelanggan dan pemasangan segel meter pelanggan.
- Melakukan kegiatan pemasaran kepada calon pelanggan, melalui sosialisasi langsung PDAM kepada calon pelanggan dan sosialisasi kepada para pelanggan eksisting, yang dilakukan secara periodik, minimal 6 bulan sekali.
- Mendirikan forum komunikasi pelanggan yang saat ini belum ada di PDAM Tirta Agung, Kabupaten Temanggung.

- Melakukan kegiatan Survei Kepuasan Pelanggan diseluruh wilayah pelayanan PDAM Tirta Agung, Kabupaten Temanggung.
- Menambah sambungan baru serta melakukan penggantian meter air pelanggan secara rutin.
- Melengkapi peralatan komunikasi dengan Handy Talky (HT) untuk 2 unit pelayanan.

3.2 Program Pengembangan Kapasitas Sistem Air Minum

Program prioritas pengembangan kapasitas sistem air minum Kabupaten Temanggung terdiri dari:

3.2.1 Program Pengembangan Kapasitas Pelayanan Perkotaan

Sistem perpipaan yang terdapat di wilayah perkotaan Kabupaten Temanggung saat ini melayani 30.346 KK yaitu sekitar 57 % dari seluruh jumlah penduduk perkotaan di Kabupaten Temanggung. Sistem perpipaan di wilayah perkotaan meliputi sistem perpipaan PDAM dan Non PDAM. Sistem perpipaan PDAM melayani 9 (sembilan) unit pelayanan yang terdiri dari 10 (sepuluh) Ibukota Kecamatan (IKK) yaitu Bulu, Jumo, Kaloran, Kedu, Kranggan, Ngadirejo, Parakan, Selopampang, Temanggung dan Tembarak.

Pengelolaan SPAM Perkotaan Sistem Perpipaan di Kabupaten Temanggung dilakukan oleh PDAM Tirta Agung. Kegiatan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung ditetapkan adalah untuk melayani masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di wilayah Kabupaten Temanggung. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Agung Kabupaten Temanggung merupakan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Temanggung yang didirikan pada tahun 1990 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Temanggung No. 3 tahun 1986 tertanggal 5 Maret 1986. Dalam perjalanannya organisasi PDAM mengalami perubahan melalui Perda No. 9 Tahun 2003, tanggal 31 Maret 2003 dan Perda No. 4 Tahun 2008, tanggal 11 Februari 2008.

Berdasarkan MDG's dengan target tingkat pelayanan yang ingin dicapai untuk wilayah perkotaan adalah sebesar 80 %. Total tingkat pelayanan sistem perpipaan perkotaan Kabupaten Temanggung belum mencapai target. Tingkat pelayanan air bersih yang telah mencapai angka 80 % hanya terjadi di beberapa Kecamatan.

Bahwa prosentase pelayanan SPAM perkotaan adalah sebesar 57 % dari jumlah perkotaan area pelayan PDAM. Angka tersebut masih jauh dari target pelayanan SPAM perkotaan yaitu 80 %. Oleh karena itu, pelayanan SPAM perkotaan jangka menengah direncanakan sudah mencapai 80 % pada tahun 2015.

3.2.2 Program Pengembangan Kapasitas Pelayanan Perdesaan

Pelayanan SPAM perpipaan wilayah perdesaan saat ini baru menjangkau 67.363 KK atau sekitar 269.452 jiwa. Tingkat pelayanan SPAM perpipaan tiap Kecamatan bervariasi. Dana pengembangan perpipaan perdesaan ini berasal dari dana DAK / APBD / APBN. Setiap jaringan SPAM perpipaan wilayah perdesaan dapat melayani penduduk antara 100 KK – 200 KK.

Perencanaan SPAM perdesaan ini diarahkan untuk dapat memenuhi target 60% tersebut pada tahun 2015 dan target pelayanan ditingkatkan menjadi 80% pada tahun 2031. Jaringan air bersih ke kelompok pengguna merupakan pengelolaan jaringan air bersih dengan sistem perpipaan maupun non perpipaan yang diusahakan untuk mencukupi kebutuhan kepada kelompok pengguna yaitu masyarakat. Pengelolaan berbasis kelompok menjadi faktor penting dalam efektifitas dan efisiensi tujuan pembangunan sistem jaringan air bersih di Kabupaten Temanggung.

3.3 Program Penurunan Kebocoran Air Minum

Program prioritas penurunan kebocoran air minum terdiri dari kebocoran air pada SPAM perpipaan di Kabupaten Temanggung yang masih cukup tinggi yaitu $\pm 26\%$, kebocoran air kebocoran air ditargetkan dapat ditekan hingga 20,8 %. Efisiensi produksi yang merupakan perbandingan antara debit produksi dan debit terpasang saat ini mencapai 89,7 % sehingga ada kapasitas yang belum dimanfaatkan.

Penyelamatan kehilangan air akibat kesalahan pembacaan meter dilakukan penggantian terhadap meter-meter tua dan rusak sejumlah 19.000 unit. Penggantian meter tua dan rusak ini dilakukan pula secara bertahap dengan jumlah penggantian meter antara 2.000 hingga 5.000 unit.

3.4 Program Peningkatan Penerapan PHBS

Penyakit lingkungan masih merupakan masalah kesehatan yang terbesar di masyarakat, tercermin dari tingginya angka kesakitan penyakit berbasis lingkungan dalam kunjungan ke sarana pelayanan kesehatan. Tingginya angka kesakitan tersebut disebabkan oleh masih buruknya kondisi sanitasi dasar terutama air bersih dan sanitasi, rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), kurang hygienisnya cara pengolahan makanan serta buruknya penatalaksanaan aspek kesehatan dan keselamatan kerja.

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) merupakan kunci utama kesehatan, untuk itu diperlukan suatu sosialisasi atau pendidikan usia dini yang dapat disampaikan untuk mendukung perubahan perilaku masyarakat hanya bisa dilakukan secara terus menerus/ periodik. Untuk itu perlu adanya dukungan pemerintah dalam hal pendanaan.

Program prioritas peningkatan penerapan PHBS meliputi..

- a. Pengawasan kualitas air minum konsumsi masyarakat;
- b. Advokasi dan bimbingan teknis jamban sehat;
- c. Advokasi dan pembinaan desa STBM;
- d. Bimbingan teknis dan pengawasan rumah sehat;
- e. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di masyarakat; dan
- f. Pemeriksaan sampel makanan dan sosialisasi keamanan pangan bagi siswa dan pedagang jajanan anak sekolah.

3.5 Program Penyediaan Kebutuhan Sanitasi

Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, 80% penduduk di Kabupaten Temanggung telah memakai jamban, tetapi hanya 66 % saja yang masuk dalam kriteria sehat. Survey

yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan meliputi 4 (aspek) yaitu: Penyediaan air bersih, kepemilikan jamban, tempat sampah dan pengelolaan air limbah.

Berdasarkan data 2010, proporsi penduduk yang memiliki akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan adalah 66 %. Sehingga masih terdapat 34 % penduduk yang belum memiliki akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan. Pada 2015, setengah dari proporsi penduduk yang belum memiliki akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan ini harus mampu diturunkan, yaitu 17 % (setengah dari 34 %). Dengan demikian, pada 2015, target proporsi penduduk Kabupaten Temanggung yang memiliki akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan adalah 83%.

Selain itu, untuk mencapai suatu target program tentunya ada beberapa faktor yang berpengaruh yaitu antara lain: adanya tahapan dari waktu ke waktu, sumber daya manusia, peran serta masyarakat, dan tersedianya sumber dana yang memadai serta adanya manajemen yang baik dalam pengelolaannya. Demikian juga ada faktor-faktor lain yang tidak terduga seperti bencana alam dan lain-lain. Pemerintah Kabupaten Temanggung juga diharuskan memenuhi target mengembangkan STBM Program prioritas penyediaan kebutuhan sanitasi meliputi:

- a. Pembangunan jamban komunal;
- b. Pembangunan IPAL komunal;
- c. Pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat.

3.6 Program Pengelolaan Lingkungan

Program prioritas pengelolaan lingkungan meliputi:

- a. Peningkatan konservasi daerah tangkapan air;
- b. Konservasi sumberdaya air dan pengendalian kerusakan sumber air;
- c. Penanaman tanaman disekitar sumber mata air dengan tanaman keras;
- d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam;
- e. Pelestarian dan pengembangan keaneka ragaman hayati;
- f. Penanganan kerusakan lingkungan berbasis masyarakat; dan
- g. Identifikasi sumber-sumber mata air.

3.7 Program Pengembangan BPSPAMS

Program prioritas pengembangan BPSPAMS meliputi:

- a. Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan SPAMS perdesaan;
- b. Pembangunan/ perluasan infrastruktur air minum perdesaan;
- c. Pengembangan dan optimalisasi SPAM perdesaan;
- d. Pembentukan/ pemberdayaan wadah asosiasi SPAM Perdesaan;
- e. Pembinaan BP SPAMS Perdesaan untuk bisa lebih mandiri.

Tabel 18. Matriks Program Prioritas RAD AMPL Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2015

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Tahun)					USULAN PROGRAM (x Rp. 1.000)			SKPD
		2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8			
102.10201.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 2 Pengembangan Desa Siaga menuju Desa Sehat	10.000.000	40.000	50.000	50.000	60.000	Dinkes			
102.10201.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1 Sosialisasi Kebijakan lingkungan sehat 2 Pemberdayaan masyarakat, promosi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat 4 Pemeriksaan kesehatan lingkungan 5 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengelolaan Limbah 6 Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat	9.714.000 14.450.000	15.000 15.000	20.000 20.000	20.000 20.000	30.000 30.000	Dinkes Dinkes			
103.10301.16	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong 1 Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong 2 Pemeliharaan Saluran drainase/ Gorong-gorong	7.450.000	10.000 60.370	20.000 70.000	20.000 70.000	30.000 80.000	Dinkes RSU			
103.10301.24	Program Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan jaringan pengairan	89.928.000	567.500 200.000	600.000 300.000	700.000 300.000	700.000 400.000	DPU DPU			

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Tahun)					USULAN PROGRAM (x Rp. 1.000)					SKPD	
		2011	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2											8	
	lainnya												
	1 Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan air bersih/ air minum		900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000		DPU	
	2 PIPANISASI		98.000									Ngadirejo	
103.10301.27	Program Pengembangan Kinerja pengelolaan air Minum dan air limbah												
	Pembangunan Sarana air bersih		940.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000		DPU	
103.10301.30	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan												
	1 Pendampingan Pamsimas		837.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000		DPU	
	2 Penyediaan sarana air bersih perdesaan			600.000	600.000	600.000	700.000	600.000	600.000	700.000		DPU	
104.10301.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan												
	2 Penyediaan air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin		100.000	120.000	120.000	120.000	140.000	120.000	120.000	140.000		DPU	
	3 Pendampingan Pembangunan Sanitasi berbasis masyarakat		124.660	130.000	130.000	130.000	150.000	130.000	130.000	150.000		DPU	
	4 Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM)		978.400	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.050.000	1.000.000	1.000.000	1.050.000		DPU	
	5 Pembangunan WC Umum		70.000									Temanggung	
	6 Saluran Pembuangan air limbah		43.992									Wonobojo	
106.10601.24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam												

KODE REKENING	URAIAN	USULAN PROGRAM (x Rp. 1.000)						SKPD
		2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	1 Penyediaan air minum dan sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	71.482.500	50.000	60.000	60.000	80.000	Bappeda	
	2 Fasilitas PPSP	140.000.000	50.000	50.000	50.000	60.000	Bappeda	
	3 Penyusunan Master Plan Drainase Kota Parakan		100.000				Bappeda	
106.10301.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			1.000.000	1.000.000	1.200.000	DPU/ BLH	
	1 Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan Persampahan			100.000	100.000	120.000	DPU	
	2 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan			250.000	250.000	300.000	DPU	
	3 Pemeliharaan kebersihan kota	175.000.000	200.000	250.000	1.000.000	1.200.000	DPU	
	4 Operasi dan Pemeliharaan alat angkut sampah dan listrik	600.000.000	975.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000	DPU	
	5 Peningkatan Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan.	250.000.000	300.000	350.000	350.000	400.000	DPU	
	6 Fasilitas Bantuan keserasian RT/RW Kabupaten Temanggung	19.250.000	30.000	50.000	50.000	70.000	DPU	
	7 Keresasian RT/RW		300.000	350.000	350.000	400.000	DPU	
	10 Revitalisasi prasarana persampahan	86.500.000	100.000				DPU	
	11 Peningkatan TPA Sangrahan	1.989.900.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	2.000.000	DPU	
	12 Pengadaan Truk Arm roll dan kontainer		550.000				DPU	
	14 Peningkatan kualitas lingkungan kabupaten		1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.200.000	DPU	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Tahun)	USULAN PROGRAM (x Rp. 1.000)				SKPD
			2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8
108.10301.20	Program Peningkatan Pengendalian Polusi 1 Pemeliharaan Kebersihan Kawasan Pusat Kota Temanggung	150.000.000	250.000	300.000	300.000	350.000	DPU
108.10801.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1 Adipura dan K-4 Kabupaten Temanggung		384.000	400.000	400.000	420.000	BLH/ 17 Kelurahan Kecamatan
108.10801.17	3 Koordinasi Penilaian Kota Sehat Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1 Konservasi Sumber daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber air	446.900.000	24.000	300.000	300.000	400.000	BLH
106.10601.23	Program Perencanaan Sosial Budaya Fasilitasi Penyusunan Data Pencapaian 1 MDG'S	20.000.000	30.000				Bappeda
122.12201.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 1 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan	33.853.000	30.000	50.000	50.000	75.000	Bapermades
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1 Lomba Sekolah Sehat		50.000	60.000	60.000	70.000	Dinas Pendidikan
	Program Kerjasama Informasi dengan Media						

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Tahun)	USULAN PROGRAM (x Rp. 1.000)					SKPD
			2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Massa							
	1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah		80.000	100.000	100.000	120.000	Bag. Humas	
	2 Penyebarluasan Informasi/ Penyuluhan bagi Masyarakat		100.000	110.000	110.000	120.000	Bag. Humas	
	Program Pembangunan Informasi Komunikasi dan Media							
	1 Penerbitan Majalah Gema Bhumi Phala		125.000	130.000	130.000	140.000	Bag. Humas	
	2 Pengisian Materi Videotron Program ke-PU-an		15.000	20.000	20.000	25.000	Bag. Humas	
	1 Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIK)		500.000				Satker PKP	
	JUMLAH	7.059.092.500	11.293.422	12.950.000	13.050.000	15.770.000		
	TOTAL APBD	874.426.886.914	1.077.439.818	1.185.183.800	1.292.927.782	1.400.671.763		
		0,81%	1,05%	1,09%	1,01%	1,13%		

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

4.1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL

Mekanisme pemantauan dan evaluasi RAD AMPL mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap RAD-AMPL dilaksanakan sebagai berikut:

1. Kepala SKPD kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi program RAD-AMPL yang menjadi tanggung jawab SKPD masing-masing;
2. Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan hasil, kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan;
3. Kepala SKPD melalui Tim Penyusun RAD AMPL menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda;
4. Kepala Bappeda kabupaten melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Penyusun RAD AMPL;
5. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian /penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah- langkah penyempurnaan untuk ditindak lanjuti oleh Kepala SKPD;
6. Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Bappeda;
7. Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

A. Materi Pemantauan dan Evaluasi

Sebagaimana tujuan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan RAD AMPL adalah untuk memberikan informasi tentang:

- ✓ Tingkat pencapaian target kinerja program dan kegiatan RAD-AMPL berdasarkan hasil pelaksanaan tahun per tahun sampai dengan 2015;
- ✓ Rekomendasi langkah tindak lanjut pada RKPD tahun berikutnya

Maka materi pemantauan dan evaluasi adalah tingkat pencapaian target kinerja serta rekomendasi untuk langkah tindak lanjut berikutnya, baik pada kebijakan, pelaksanaannya serta pemanfaatan atau tindak lanjut.

B. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali, yaitu pada bulan Juni dan Desember pada tahun yang bersangkutan.

C. Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi program Percepatan Pencapaian Target AMPL (7C MDGs) pada dasarnya dilakukan oleh semua pelaku atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) Percepatan Pencapaian Target *Millenium Development Goals* (MDG's)

Kabupaten Temanggung. Pemantauan dan Evaluasi program Percepatan Pencapaian Target 7C Millenium Development Goals (MDG's) Kabupaten Temanggung pada Lembaga Pemerintah dilakukan secara internal oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kebijakan dan program, serta mengukur dampak kebijakan dan program pencapaian Target 7C MDG's. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi program Percepatan Pencapaian Target 7C MDG's Kabupaten Temanggung juga menerima masukan hasil pemantauan dan evaluasi indenpenden oleh lembaga-lembaga Non Pemerintah seperti LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Organisasi Profesi, dan Media Massa. Hasil Pemantauan dan evaluasi, baik yang dilakukan oleh Lembaga Pemerintah maupun Lembaga Lembaga Non Pemerintah diverifikasi dan dikonsolidasikan oleh Tim Penyusun RAD AMPL Kabupaten Temanggung Tahun 2011 – 2015 untuk kemudian dilaporkan kepada Bupati melalui Bappeda.

D. Peran DPRD dalam Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL

1. Melaksanakan pembahasan rutin (misalnya melalui rapat kerja , rapat komisi) hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program AMPL.
2. Mendorong dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi RAD-AMPL.
3. Memastikan adanya alokasi program dan anggaran untuk pengembangan kapasitas BPSPAMS, pemeliharaan dan perluasan pelayanan air minum dan sanitasi perdesaan.

4.2. Formulir Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL

BAB V PENUTUP

Tujuan Pembangunan AMPL yang ditargetkan dapat dicapai di Tahun 2015 dapat dijadikan sebagai salah satu pemacu dan semangat untuk dapat melakukan upaya yang lebih baik dalam mensejahterakan masyarakat. Penanggulangan permasalahan air minum dan penyehatan lingkungan bukanlah masalah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung saja, namun oleh seluruh masyarakat Temanggung, termasuk masyarakat yang menjadi sasaran.

Pemerintah Kabupaten Temanggung mendukung dan melaksanakan upaya pengembangan AMPL. Komitmen tersebut telah tertuang di dalam dokumen-dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah maupun tahunan, dengan melaksanakan berbagai program/ kegiatan serta berbagai sumber dana melalui strategi penanganan langsung maupun tidak langsung.

Terkait dengan sosiokultural masyarakat, upaya pengembangan AMPL tidak akan berhasil apabila tidak diimbangi dengan program penyadaran masyarakat (*public awareness*) yaitu sebuah upaya untuk mengurangi atau bahkan menghapuskan mental dan budaya miskin dengan jalan mengingatkan, meyakinkan dan memberikan semangat kepada masyarakat agar berusaha untuk bangkit dari kemiskinan dengan melakukan kerja keras dan membiasakan diri untuk malu menerima bantuan sebagai orang miskin.

Koordinasi di antara *stakeholders* maupun instansi sangat perlu dioptimalkan, terutama dalam hal penentuan target dan sasaran program kegiatan AMPL secara berjenjang dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/ Kelurahan sampai ke tingkat kelompok sasaran. Hal ini dilakukan melalui mekanisme Musrenbang dalam siklus perencanaan dan penganggaran tahunan daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan RAD AMPL perlu didukung oleh upaya penciptaan tata pemerintahan yang baik. Yaitu sebuah tata pemerintahan yang mengedepankan hubungan sinergi antara elemen-elemen pemerintah, swasta Dan masyarakat sipil dengan melibatkan masyarakat itu sendiri berdasarkan prinsip-prinsip partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan pada pengutamaan kepentingan masyarakat.

Percepatan Pencapaian RAD AMPL ini memerlukan dukungan dan peran serta seluruh pelaku pembangunan dari kalangan pemerintah, DPRD, perguruan tinggi, organisasi dan lembaga swadaya masyarakat, swasta dan lembaga internasional. Keterlibatan dan dukungan ini diharapkan terus berlanjut sampai pada pelaksanaan RAD AMPL dan evaluasi pencapaian hasil RAD AMPL. Keterlibatan seluruh pelaku pembangunan diharapkan akan mendorong terbangunnya sebuah kesamaan cara pandang, kesepakatan dan sinergi dalam melakukan upaya Percepatan Pencapaian target 7C MDGs Kabupaten Temanggung.

Dokumen RAD AMPL ini merupakan acuan bagi seluruh pelaku pembangunan baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat dalam melakukan upaya peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi Kabupaten Temanggung sampai dengan 2015 mendatang. Dokumen ini terbuka untuk perubahan/ penyesuaian berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.

Dokumen RAD AMPL ini diharapkan mampu menjadi pemandu arah bagi peningkatan kapasitas dan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi Kabupaten Temanggung menuju sasaran yang disepakati selama Tahun 2011-2015.

SEKDA	K
ASISTEN I / III / IIII	A.
KABAG HUKUM	f

BUPATI TEMANGGUNG,


HASYIM AFANDI

LAMPIRAN

Lampiran

**RENCANA AKSI DAERAH
AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2011 – 2015**

Tujuan 7 : Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup

NO	KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR / OUTPUT	CAPAIAN 2010	TARGET CAPAIAN					ANGGARAN (Rp. 000,-)					SUMBER PENDANAAN	PELAK SANA	KETERA NGAN
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
TARGET 7C : Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015																
Indikator MDGs																
1. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (perkotaan dan pedesaan)																
2. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar (perkotaan dan pedesaan)																
1	Program promosi kesehatan & pemberdayaan masyarakat															
1.1	Pengembangan media promosi & sadar hidup sehat			23 pusk	23 pusk	24 pusk	24 pusk	24 pusk	52.536	57.789	63.568	69.925	76.918	APBD KAB	DINKES	
1.2	Pengembangan usaha kesehatan anak sekolah			23 pusk	23 pusk	24 pusk	24 pusk	24 pusk	37.197	40.917	45.010	49.511	54.462	APBD KAB	DINKES	
1.3	Pengembangan desa siaga menuju desa sehat.			25 desa	25 desa	25 desa	25 desa	25 desa	22.275	24.502	26.952	29.647	32.612	APBD KAB	DINKES	
2	Program pengembangan lingkungan sehat															
2.1	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat			289 ds/ kel	289 ds/ kel	289 ds/ kel	289 ds/ kel	289 ds/ kel	50.000	80.000	100.000	105.000	110.000	APBD KAB	DINKES	
2.2	Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat			289 ds/ kel	289 ds/ kel	289 ds/ kel	289 ds/ kel	289 ds/ kel	70.000	85.000	95.000	100.000	105.000	APBD KAB	DINKES	
2.3	Pemberdayaan masyarakat, promosi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat (pendampingan)			23 pusk	23 pusk	23 pusk	23 pusk	23 pusk	55.000	65.000	80.000			APBD KAB	DINKES	
2.4	Pamsimas		37 desa	20 Desa	13 desa				364.710	365.835				APBN	DINKES	
2.5	Bantuan stimulan jamban								123.000	40.000				APBD PROV	DINKES	
2.6	Pemeriksaan kesehatan lingkungan								7.500	7.450				APBD KAB	DINKES	
2.7	Pengembangan klinik sanitasi								8.077							

NO	KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR / OUTPUT	CAPAIAN 2010	TARGET CAPAIAN						ANGGARAN (Rp. 000,-)						SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	KETERANGAN
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	2.8 Uji petik pemeriksaan udara								3.025									
	2.9 Inspeksi sanitasi TUPM								520									
3	Program pengembangan & pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengaliran lainnya																	
	3.1 Pembangunan jaringan air bersih/ air minum								555.895									
	3.2 Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi	Terpeliharanya saluran irigasi		15 Lokasi	21 Lokasi					3.896.150	5.142.765				APBD KAB	DPU		
	3.3 Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi (pendampingan DAK non DR)	Terpeliharanya saluran irigasi		15 Lokasi	15 Lokasi	15 Lokasi	15 Lokasi		503.025	503.025	506.499	506.499	506.499		APBD KAB	DPU		
	3.4 Rehab/ pemeliharaan jaringan air bersih/ air minum.	Terbangunnya sarana air bersih perdesaan		4 Unit						711.010					APBD KAB	DPU		
	3.5 Rehabilitasi/ pemeliharaan pintu air	Terkendalinya pengaturan debit air		Kab	Kab	Kab	Kab		99.200	98.125	99.200	99.200	100.000		APBD KAB	DPU		
	3.6 Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi yang telah terbangun	Terpeliharanya infrastruktur irigasi		Kab	Kab	Kab	Kab		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000		APBD KAB	DPU		
	3.7 Rehabilitasi pemeliharaan peminaan petani pemakai air (P3A)	Pemahaman terhadap petani pemakai air tentang pemeliharaan jaringan irigasi		Kab	Kab	Kab	Kab		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		APBD KAB	DPU		
	3.8 Pendampingan water resources and irrigation sector managemen program (WISMP)	Terbangunnya infrastruktur irigasi		Kab	Kab	Kab	Kab		613.500	606.098	613.500	613.500	613.500		APBD KAB	DPU		
	3.9 Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan air bersih/ air minum	Terbangunnya sarana air bersih di perdesaan							94.646	94.646	94.646	94.646	100.000		APBD KAB	DPU		
	3.10 Pembangunan bendung dan jaringan irigasi								1.750.000						APBD KAB	DPU		
	3.11 Air sistem PDAM				485 KK						400.000				APBD KAB	DPU		
	3.12 Rehabilitasi PSAB suroloyo (bejen)				10.000 meter						500.000				APBD KAB	DPU		
	3.13 Pembangunan sumur resapan desa krusian				7 unit						35.000				APBD KAB	DPU		

NO	KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR / OUTPUT	CAPAIAN 2010	TARGET CAPAIAN						ANGGARAN (Rp. 000.-)						SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	KETERANGAN
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
6.10	Fasilitasi peningkatan kualitas lingkungan kab. Temanggung	Program lingkungan sehat perumahan									25.000	30.000	35.000	APBD KAB	DPU			
6.11	Pengadaan armada sampah	Kelancaran operasional pengelolaan persampahan									500.000	550.000	600.000	APBD KAB	DPU			
7.	Program pengembangan perumahan																	
7.1	Fasilitasi pemugaran pemukiman rumah tidak layak huni	Terlaksananya prasarana sarana/utilitas		40 kk 2 lokasi	60 kk 3 lokasi					200.000	300.000			APBD KAB	DPU			
7.2	Pembangunan sarpras pemukiman tempat relokasi	Terbangunnya sarana air bersih, sanitasi, jaringan listrik							596.970	942.500	942.500	942.500	942.500	APBD KAB	DPU			
7.3	Pendampingan pembangunan sarana prasarana rumah sederhana sehat	Terlaksananya sarana prasarana utilitas							161.420		1.500.000	1.500.000	1.500.000	APBD KAB	DPU			
7.4	Fasilitasi bantuan perumahan tidak layak huni (RTLH)	Terlaksananya pemberian bantuan kepada MBR/RTR		250 Unit					1.875	150.000	150.000	150.000	150.000	APBD KAB	DPU			
8.	Belanja tidak langsung																	
8.1	Belanja hibah PNPM perkotaan	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam aksi bersama penanggulangan kemiskinan		41 Kel	41 kel	41 kel	41 kel	41 Kel	4.240	650.000	650.000	650.000	650.000	APBN	DPU			
8.2	Belanja hibah PAMSIMAS	Pembangunan sarana prasarana air bersih dan sanitasi		20 Desa	13 desa				1.060	440.000	247.500	247.500	247.500	APBN	DPU			
8.3	Belanja hibah sanitasi lingkungan berbasis masyarakat (SLBM)	Terlaksananya SLBM		3 Lok	3 Lok				931.260	846.600	846.600	846.600	846.600	APBN	DPU			
8.4	Keserasian RTRW	Terlaksananya bantuan keserasian		35 lok	35 lok	35 lok	35 lok	35 lok	150.000	200.000	300.000	400.000	500.000	APBD KAB	DPU			
8.5	Belanja hibah urusan pekerjaan umum	Meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam aksi bersama penanggulangan kemiskinan		113 loki	208 lok	208 lok	208 lok	208 lok	1.518.900	6.924.246	6.924.246	6.924.246	6.924.246	APBN	DPU			
8.6	Belanja hibah peningkatan kualitas lingkungan	Tercapainya peningkatan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup				22 lok				250.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	APBN	DPU			

NO	KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR / OUTPUT	CAPAIAN 2010	TARGET CAPAIAN					ANGGARAN (Rp. 000,-)					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	KETERANGAN	
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2	3	4														
9.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan																
9.1	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Meningkatnya prakarsa dan kemandirian masyarakat	289 desa	289 desa	289 desa												
9.2	Pemberian stimulan pembangunan desa	Terbantuinya pemenuhan kebutuhan gizi anak sekolah dan terpantaunya perkembangan warung sekolah pelaksanaan PMT-AS mandiri	2.250 siswa	2.500 siswa	2.750 siswa												
9.3	Bantuan stimulan dalam penerangan perumahan dan penataan lingkungan	Meningkatnya kondisi perumahan dan lingkungan yang memenuhi syarat teknis, sehat, dan susila	250 unit	250 unit	250 unit												
9.4	Gerakan penanaman lurus jalan	Meningkatnya fungsi lingkungan	289 desa	289 desa	289 desa												
10	Program peningkatan kebudayaan masyarakat pedesaan																
10.1	Koordinasi, monitoring, dan evaluasi PKPS-BBM	Teridentifikasi permasalahan PKPS-BBM	20 kec	20 kec	20 kec												
10.2	Pendampingan PNPM-MD	Meningkatnya kemandirian dalam setiap tahapan program	18 kec	18 kec	18 kec												
11	Program dan Kegiatan PDAM Tirta Agung Kam. Temanggung																
11.1	Peramban sambilan Rumah	Meningkatnya jumlah pelanggan PDAM (SR)	26.457 SR	1.311	1.750	1.850	1.450	1.200	3.933.000	5.250.000	5.550.000	4.350.000	3.600.000	PDAM	PDAM		
11.2	NRW (%)	Mengurangi tingkat kebocoran	26,80 %	26 %	24,5 %	23,1 %	21,7 %	20,8 %	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	PDAM	PDAM		
11.3	Kebutuhan Kapasitas Produksi (Liter / Detik)	Meningkatnya kapasitas produksi air.	329 Lt/det	10 Lt/det	10 Lt/det	10 Lt/det	15 Lt/det	10 Lt/det	1.300.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000	850.000	PDAM	PDAM		
														APBN	PDAM		